



RESEARCH ARTICLE

OPTIMALISASI BIMBINGAN PENYULUHAN OLEH SATUAN BINMAS DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES CILACAP

Salman Putra Pratama^{1✉}

¹Akademi Kepolisian Republik Indonesia, Semarang, Indonesia
✉salmanputra@gmail.com

ABSTRAK

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Cilacap masih menjadi favorit bagi para pelaku kejahatan. Mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, pihak Polres Cilacap menjadi tumpuan bagi masyarakat Cilacap dalam menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan kegiatan preemtif yang telah dilakukan oleh Polres Cilacap khususnya satuan Binmas dalam melakukan pencegahan terhadap terjadinya pencurian kendaraan bermotor melalui bimbingan penyuluhan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian lapangan. Sebagai pisau analisis, peneliti menggunakan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007, teori Manajemen, dan analisis SWOT. Berdasarkan temuan peneliti, pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas Polres Cilacap dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ditemukan beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu faktor internal dan eksternal. Saran yang dapat diberikan oleh peneliti yaitu : (1) perlu adanya evaluasi terhadap SOP Penyuluhan yang telah dibuat oleh satuan Binmas Polres Cilacap, (2) perbaikan dan penambahan sarana prasarana dalam mendukung pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas Polres Cilacap terutama terhadap alat peraga, alins, dan/atau alongins, (3) memberikan kesempatan kepada personel satuan Binmas yang belum melaksanakan Dikjur Binmas, (4) melakukan inovasi terhadap metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan selain program Binmas Vaganza, (5) melakukan koordinasi dengan unit Binmas yang ada di Polsek – Polsek terutama Polsek yang berada di perbatasan wilayah Cilacap, (6) membuat kotak saran disertai dengan nomor telepon yang dapat dihubungi disetiap tempat dilaksanakannya bimbingan penyuluhan.

Kata Kunci : *Bimbingan Penyuluhan, Satuan Binmas, Mencegah - Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor*

PENDAHULUAN

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Mayoritas negara di dunia saat ini mengalami kemajuan pesat dari berbagai aspek, termasuk juga negara Indonesia. Keberhasilan bangsa Indonesia dalam melakukan pembangunan nasional selama ini banyak mengalami kemajuan. Hal ini dapat dilihat dari kesejahteraan bangsa Indonesia dalam hal kemajuan ilmu teknologi dan pengetahuan serta taraf hidup masyarakatnya. Hal tersebut sesuai dengan tujuan negara yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea keempat sebagai berikut :

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keberhasilan tersebut tidak lepas dari peran Polri sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.

Namun seiring dengan berjalannya waktu ada yang dihasilkan dari pembangunan nasional tersebut yaitu perubahan kehidupan sosial masyarakat. Perubahan tersebut menimbulkan penyimpangan dari kebudayaan masyarakat sehingga muncullah berbagai tindak kejahatan.

Pada era globalisasi saat ini, dimana kemajuan ilmu teknologi yang berkembang sangat pesat dan disertai dengan taraf hidup masyarakat yang semakin meningkat. Masyarakat mulai melakukan penyesuaian dengan berbagai cara guna mendukung kehidupannya. Dalam proses adaptasi tersebut terjadi perubahan nilai - nilai dan norma dalam kehidupan masyarakat khususnya dibidang transportasi.

Pengaruh transportasi memunculkan keanekaragaman bentuk dan macam alat transportasi guna menunjang aktivitas kehidupan sehari - hari masyarakat Indonesia. Khususnya untuk transportasi darat, baik kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat guna memudahkan pengguna untuk mencapai suatu tujuan dengan cepat.

Pada zaman sekarang, kendaraan bermotor sangatlah dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia guna menunjang kegiatan sehari - hari bahkan merupakan salah satu kebutuhan sekunder yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, sebagian masyarakat menjadikan kendaraan bermotor sebagai ladang penghasilan cepat. Dilihat dari mudahnya masyarakat mendapatkan kendaraan bermotor hanya dengan membayar uang muka atau secara kredit. Namun tidak sedikit juga masyarakat yang memanfaatkan hal tersebut dengan melakukan penyimpangan sosial berupa melakukan pencurian ataupun kejahatan - kejahatan lainnya yang dapat mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kabupaten Cilacap merupakan salah satu daerah yang memiliki tingkat gangguan kamtibmas yang tinggi di Jawa Tengah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1.1
Jumlah Gangguan Kamtibmas Tahun 2013 - 2016 di Cilacap

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016
1	Kejahatan / Kriminalitas	448	385	397	311
2	Gar Hukum / Tipiring	317	158	199	326
3	Guan thdp Ketentraman / ketertiban	142	182	171	130
4	Bencana	10	18	7	15

Sumber : Intel Dasar Satuan Intelijen Polres Cilacap, 2016

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa gangguan kamtibmas yang paling tinggi adalah kejahatan. Kejahatan yang terjadi di Cilacap berbagai macam jenis dan jumlah yang tidak sedikit. Berikut tabel jumlah kejahatan yang terjadi di Cilacap :

Tabel 1.2
Jumlah Kejahatan yang Terjadi di Cilacap Tahun 2013 - 2016

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016
1	Curat	115	152	61	56
2	Curanmor	34	14	64	52
3	Narkoba	38	46	31	35
4	Perjudian	37	32	45	50
5	Curras	6	6	12	10

Sumber : Intel Dasar Satuan Intelijen Polres Cilacap, 2016

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Polres Cilacap mengalami penurunan dari tahun 2013 ke tahun 2014. Namun, dari tahun 2014 ke tahun 2015 mengalami peningkatan yang sangat besar yaitu mencapai empat kali lipat. Kemudian dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami penurunan kembali. Hal tersebut menunjukkan bahwa pencurian kendaraan bermotor masih menjadi favorit bagi para pelaku kejahatan. Mengingat Cilacap merupakan daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat, selain itu Cilacap juga merupakan jalan Negara lintas selatan pulau Jawa yakni jalur Bandung - Yogyakarta - Surabaya yang memudahkan pelaku kejahatan menyembunyikan atau menjual hasil curiannya. Mengenai kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini, pihak Polres Cilacap menjadi tumpuan bagi masyarakat Cilacap dalam menciptakan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki peran utama dalam mewujudkan keamanan dalam negeri. Sesuai dengan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam UU No. 2 Tahun 2002 Pasal 13 yaitu, Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, Polri terus berupaya berinovasi dan beradaptasi dalam menghadapi kejahatan atau masalah - masalah sosial lainnya, hal tersebut dikarenakan perkembangan kejahatan berbanding lurus dengan perkembangan zaman.

Terciptanya keamanan dan ketertiban merupakan harapan dari seluruh masyarakat Indonesia. Sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia Pasal 4 yang menjelaskan tentang tujuan Polri, yaitu bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi kepolisian dijelaskan dalam Pasal 2 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Polri yaitu, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Termasuk diantaranya adalah upaya preemtif, preventif, dan represif.

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan tentang upaya preemtif dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Upaya preemtif dapat dilakukan dengan melakukan upaya - upaya himbauan dan pencegahan melalui kegiatan bimbingan penyuluhan yang dapat dilakukan oleh Polri khususnya satuan Binmas Polres Cilacap. Dengan kegiatan bimbingan penyuluhan tersebut diharapkan masyarakat Cilacap mengerti akan pentingnya keamanan dan ketertiban serta dapat menjadi polisi bagi dirinya sendiri.

Dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan tersebut dijelaskan dalam Perkap. No. 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan tersebut selaras dengan program Kapolri saat ini yaitu PROMOTER (Profesional, Modern, Terpercaya) tepatnya pada poin ke 8 yaitu pembangunan kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap kamtibmas.

Berdasarkan uraian di atas dapat diidentifikasi terkait permasalahan yang ditemukan yaitu belum terlaksanakannya tujuan satuan Binmas serta masih terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah Cilacap. berdasarkan identifikasi permasalahan tersebut, maka peneliti melakukan penelitian tentang "OPTIMALISASI BIMBINGAN PENYULUHAN OLEH SATUAN BINMAS POLRES CILACAP DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM POLRES CILACAP".

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian pada latar belakang permasalahan diatas, maka pokok permasalahan skripsi ini adalah "Bagaimana optimalisasi bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap?". Selanjutnya dari permasalahan tersebut dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap?
2. Apa faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap?
3. Bagaimana upaya - upaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Mendeskripsikan mengenai pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap.

2. Mendeskripsikan faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap.
3. Mendeskripsikan upaya - upaya dalam mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan peneliti ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun segi praktis, yaitu :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dalam penelitian ini, yaitu :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk memperkaya ilmu dan pengetahuan dibidang ilmu kepolisian mengenai kegiatan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat yaitu dapat memberikan informasi serta diharapkan masyarakat dapat ikut serta dalam mencegah terjadinya kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber rujukan atau referensi terhadap penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa depan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini, yaitu diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi organisasi Polri dalam menetapkan teknik atau upaya pencegahan yang tepat terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya satuan Binmas.

TINJAUAN KEPUSTAKAAN

2.1 Kepustakaan Penelitian

Studi kepustakaan merupakan suatu keharusan yang harus dilakukan dalam suatu proses penelitian. Kepustakaan penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai hasil penelitian terdahulu. Kepustakaan penelitian ini mengacu pada referensi bahan - bahan penelitian terdahulu yang dianggap relevan atau kesamaan topik dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, dengan maksud untuk memberikan masukan atau acuan arah penelitian dan mendapatkan sumber data awal, yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan dasar pemikiran dan informasi tambahan, serta menambah wawasan.

Kepustakaan penelitian pertama yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian oleh Vebri Syntia (mahasiswa PTIK angkatan 62) dengan judul "Optimalisasi program Polmas *Jakwire Wong Tegal* mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif di Polres Tegal Kota" menghasilkan kesimpulan bahwa :

1. Program Polmas *Jakwire Wong Tegal* yang diterapkan selama Ini di wilayah hukum Polres Tegal Kota dengan mengadopsi falsafah masyarakat Kota Tegal dirasakan belum optimal dalam mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Hal tersebut ditandai dengan adanya peningkatan tren kejahatan selama beberapa tahun terakhir.

2. Adapun faktor yang menyebabkan pelaksanaan Program Polmas *Jakwire Wong Tegal* belum optimal berdasarkan temuan di lapangan, yaitu :
 - a. Sumber daya manusia yang dipandang masih memiliki keterbatasan dalam jumlah personel, juga dalam pengetahuan dan kemampuan memahami budaya lokal Kota Tegal.
 - b. Dukungan anggaran, dimana pelaksanaan program belum didukung anggaran operasional yang memadai.
 - c. Sarana prasarana pendukung program Polmas *Jakwire Wong Tegal* yang masih terbatas.
 - d. Sistem dan metode program Polmas *Jakwire Wong Tegal* yang dipilih kurang sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat.
 - e. Pelaksanaan/sosialisasi program Polmas *Jakwire Wong Tegal* kurang dikelola secara baik/kurang menjangkau masyarakat luas.
 - f. Pengawasan terhadap pelaksanaan program Polmas *Jakwire Wong Tegal* kurang optimal.
3. Upaya mengoptimalkan program Polmas *Jakwire Wong Tegal* di wilayah hukum Polres Tegal Kota ada beberapa aspek yang perlu mendapat penataan meliputi aspek SDM, sistem dan metode, sarana prasarana, dukungan anggaran, kerjasama, peran pro-aktif masyarakat dalam mendukung upaya - upaya penciptaan Kamtibmas dan penegakan hukum di Kota Tegal, dan optimalisasi tugas maupun wewenang petugas Polmas. Hal tersebut dilakukan untuk mewujudkan Kamtibmas yang kondusif di wilayah Polres Tegal Kota sesuai harapan masyarakat dan Kepolisian.

Kepustakaan penelitian kedua yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian oleh Johan Kuniawan (mahasiswa PTIK angkatan 62) dengan judul "Upaya satuan Binmas Polresta Bandar Lampung dalam mencegah curanmor di Kelurahan Kampung Baru" menghasilkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Kelurahan Kampung Baru memiliki masyarakat yang bersifat heterogen. Sehingga termasuk daerah yang strategis karena banyak masyarakat pendatang yang umumnya mahasiswa di kelurahan ini membuat potensi terjadinya curanmor semakin besar. Hal ini disebabkan oleh kelalaian masyarakat sendiri dalam menjaga keamanan kendaraan mereka. Selain itu faktor ekonomi yang menjadi alasan bagi pelaku untuk melakukan tindak pidana berupa curanmor. Hal-hal tersebut di atas merupakan penyebab utama curanmor di Kelurahan Kampung Baru.
2. Dalam menjalankan tugasnya, anggota Satuan Binmas menghadapi beberapa faktor baik internal seperti kurangnya personel anggota Satuan Binmas, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran, yang tersedia, maupun faktor eksternal seperti kurangnya kesadaran masyarakat seperti bersikap apatis dan acuh tak acuh terhadap lingkungan sekitarnya, kurangnya partisipasi masyarakat, serta semakin pintar pelaku dalam melakukan tindak pidana khususnya curanmor.
3. Tindakan yang dilakukan oleh Satuan Binmas dalam mencegah terjadinya curanmor di Kelurahan Kampung Baru telah dilakukan dengan berbagai hal baik preemtif maupun preventif. Secara preventif dengan melaksanakan patroli. Secara preemtif dengan memberikan pembinaan terhadap masyarakat baik secara formal maupun informal seperti dengan mendatangi RT atau Kelurahan pada pertemuan - pertemuan, memberikan pencerahan melalui khotbah sholat Jum'at, melakukan perkumpulan dengan para tukang ojek, mendatangi rumah kost - kostan, dan memberikan masukan pada para pemilik lahan parkir, baik pemilik toko, warnet,

dan tempat dimana kendaraan biasa diparkir untuk memberikan sarana yang memadai. Selain itu juga telah dibentuk kegiatan Pokdar Kamtibmas yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keamanan lingkungan sekitarnya.

Tabel 2.1
Rangkuman Penelitian Terdahulu

No.	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Optimalisasi program Polmas <i>Jakwire Wong Tegal</i> mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat kondusif di Polres Tegal Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan kualitatif • Meneliti tentang optimalisasi • Menggunakan teori Manajemen 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian dilakukan di Polres Tegal Kota, sedangkan peneliti dilakukan di Polres Cilacap • Menekankan pada keterlibatan masyarakat di wilayah Polres Tegal Kota dalam mewujudkan kamtibmas.
2.	Upaya satuan Binmas Polresta Bandar Lampung dalam mencegah curanmor di Kelurahan Kampung Baru	<ul style="list-style-type: none"> • Menggunakan pendekatan kualitatif • Meneliti mengenai satuan Binmas • Meneliti mengenai tindak pidana pencurian kendaraan bermotor 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi penelitian dilakukan di Polresta Bandar Lampung, sedangkan peneliti dilakukan di Polres Cilacap • Menekankan pada upaya satuan binmas dalam mencegah curanmor, sedangkan peneliti menekankan pada optimalisasi bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah curanmor

Sumber : Penelitian terdahulu, diolah oleh penulis

2.2 Kepustakaan Konseptual

Kepustakaan konseptual digunakan untuk dasar pemikiran agar penelitian menjadi terarah dan mempunyai batasan - batasan tertentu. Yang menyajikan konsep, teori, prinsip,

pendapat maupun gagasan dari seseorang, yakni yang memiliki kompetensi untuk disiplin ilmu atau pengetahuan yang ditekuninya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

2.2.1 Konsep

Digunakan untuk memahami arti kata dari kata maupun rangkaian kata yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini, disajikan beberapa konsep sebagai berikut:

2.2.1.1 Konsep Bimbingan Penyuluhan

Konsep bimbingan penyuluhan ini dijelaskan dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat tepatnya pada Pasal 1 angka 2 yaitu Bimbingan penyuluhan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memberikan tuntunan, petunjuk, dan penerangan kepada individu atau kelompok secara terus - menerus dengan maksud agar terjadi perubahan perilaku atau sikap yang berguna bagi diri pribadi maupun kelompok atau masyarakat. Tujuan diadakannya bimbingan penyuluhan adalah untuk menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat yang tercantum dalam Pasal 2 angka 1 yaitu :

- Pasal 2
- (1) Tujuan Kamtibmas
- a. Tujuan strategis; dan
 - b. Tujuan teknis operasional.

Tujuan strategis sebagaimana yang dimaksud Pasal 2 angka 1 huruf a tertera dalam Pasal 2 angka 2 sebagai berikut : (1) Terwujudnya pesan - pesan kamtibmas yang disampaikan kepada masyarakat yang berdampak pada terciptanya kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif; (2) Terjalinnnya komunikasi secara langsung antara petugas Polri dengan warga masyarakat; (3) Terciptanya pemahaman bahwa kamtibmas merupakan suatu kebutuhan yang harus dilakukan bersama - sama antara Polri dan elemen masyarakat lainnya; (4) Terwujudnya citra Polri sebagai aparat pemerintah penegak hukum yang siap melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat serta menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Tujuan teknis operasional tertera dalam Pasal 2 angka 3 sebagai berikut : (1) Termotivasinya komponen masyarakat untuk membentuk FKPM; (2) Teraplikasinya dalam kehidupan sehari - hari pesan - pesan kamtibmas disampaikan; (3) Terciptanya kemitraan antara Polri dan masyarakat untuk bersama - sama memelihara kamtibmas. Serta terdapat metode pelaksanaan penyuluhan yang tertera pada Pasal 6 Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007, yaitu :

- Pasal 6
- Metode bimbingan penyuluhan kamtibmas dilaksanakan melalui :
- a. Ceramah;
 - b. Konseling;
 - c. Pemasangan spanduk dan *leaflet* kamtibmas;
 - d. Tanya jawab kamtibmas;
 - e. Diskusi;
 - f. Panggung hiburan kamtibmas;
 - g. Pesan kamtibmas melalui tokoh agama dan tokoh masyarakat;
 - h. Media cetak, media elektronik, dan media komunikasi lainnya.

2.2.1 Teori

Dalam rangka menganalisis hasil temuan yang terdapat pada penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teori sebagai pisau analisis agar hasil penelitian bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

2.2.2.1 Teori Manajemen (P.O.A.C)

Pengertian tentang definisi manajemen, setiap pakar mengartikannya berbeda-beda, hal ini tergantung dari sudut pandang, keyakinan serta pengertian dari pembuat definisi. Menurut George R. Terry (2009:9)

Manajemen mencakup kegiatan untuk mencapai tujuan, dilakukan oleh individu – individu yang menyumbangkan upayanya yang terbaik melalui tindakan – tindakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal tersebut meliputi pengetahuan tentang apa yang harus mereka lakukan, menetapkan bagaimana cara melakukannya, memahami bagaimana mereka harus melakukannya dan mengukur efektivitas dari usaha – usaha mereka. Selanjutnya perlu menetapkan dan memahami pula suatu kondisi lingkungan yang memberikan responsi ekonomis, psikologis, sosial, politis dan sumbangan – sumbangan teknis serta pengendaliannya.

Semua tindakan yang dimaksud oleh George R. Terry di atas disingkat dengan P.O.A.C dan yang dimaksud adalah :

- a. Planning (perencanaan)
- b. Organizing (pengorganisasian)
- c. Actuating (pelaksanaan)
- d. Controlling (pengawasan)

Pada teori manajemen George R. Terry ini jika dikaitkan dengan tugas pokok Polri yang sesuai dengan pasal 13 Undang - Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka Polri dalam menjalankan tugas pokok dan perannya dilaksanakan melalui langkah - langkah manajemen agar tujuan yang diinginkan tercapai yaitu situasi yang kondusif dan Supremasi Hukum. Seperti yang kita ketahui keseluruhan unsur manajemen di atas diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Polri. Apabila tanpa dukungan unsur - unsur tersebut suatu kegiatan organisasi tidak akan berjalan dengan lancar. Dikarenakan seluruh unsur -unsur tersebut saling berkaitan dan saling membutuhkan satu sama lain sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh organisasi.

2.2.2.2 Analisis S.W.O.T

Seperti dikutip dari bahan ajar Manajemen Pembinaan Polri Akademi Kepolisian (2015 : 102), dalam rangka pengambilan suatu keputusan dalam perencanaan strategik, diperkenalkan salah satu model perencanaan dengan menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats). Berikut adalah penjelasannya :

- a. Strengths (kekuatan)
Mengetahui kelebihan dan kekuatan yang dimiliki oleh Polres Cilacap khususnya dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas.
- b. Weaknesses (kelemahan)
Menganalisis kekurangan yang dimiliki oleh Polres Cilacap khususnya dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh Satuan Binmas.
- c. Opportunities (kesempatan)

Melihat kesempatan yang ada di dalam masyarakat atau dari pihak luar lainnya sehingga dengan peluang tersebut pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh Satuan Binmas yang ada di Polres Cilacap dapat berjalan optimal.

d. Threats (ancaman)

Menganalisis ancaman yang muncul dari masyarakat sehingga pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Cilacap dapat dioptimalkan.

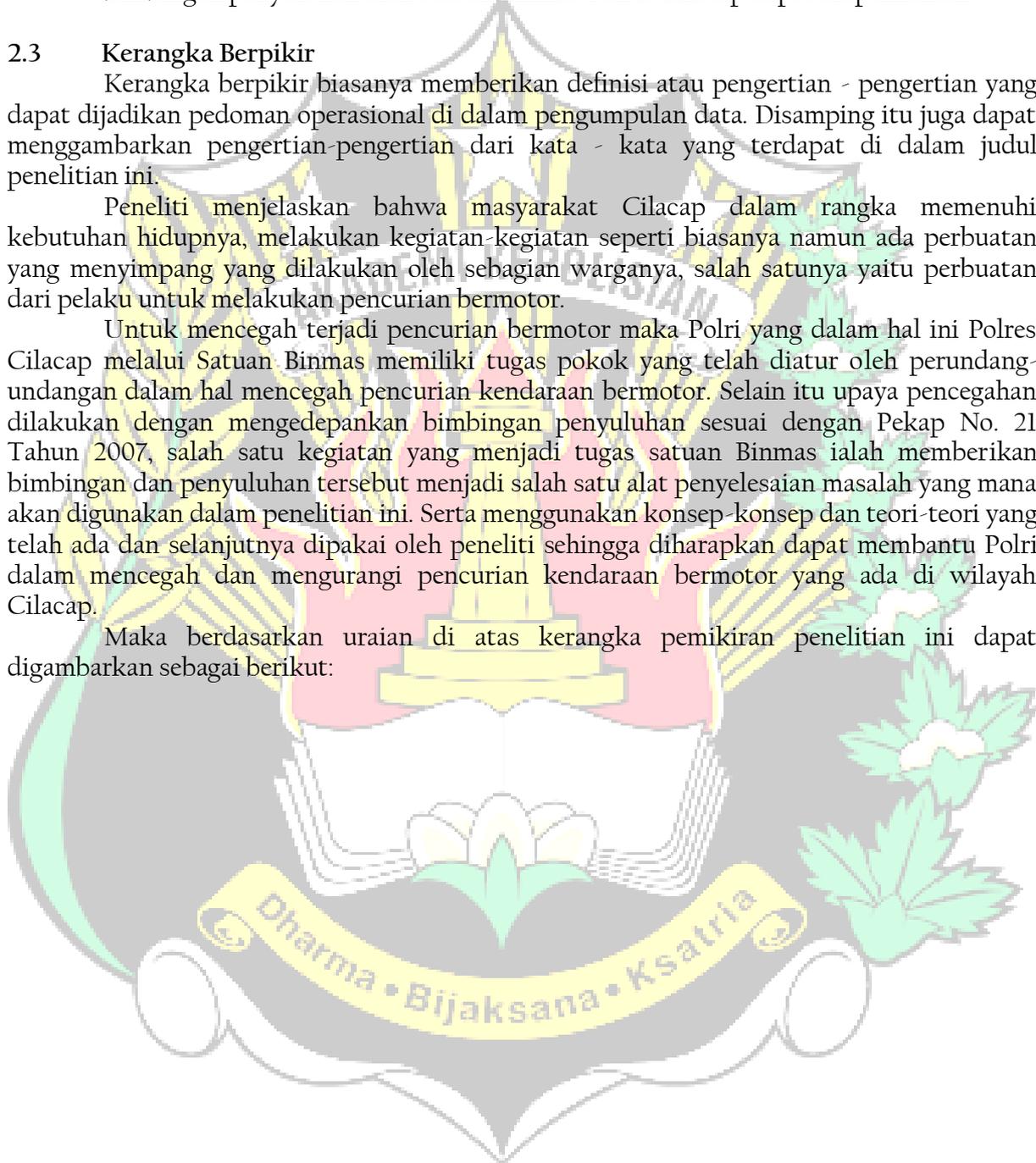
2.3 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir biasanya memberikan definisi atau pengertian - pengertian yang dapat dijadikan pedoman operasional di dalam pengumpulan data. Disamping itu juga dapat menggambarkan pengertian-pengertian dari kata - kata yang terdapat di dalam judul penelitian ini.

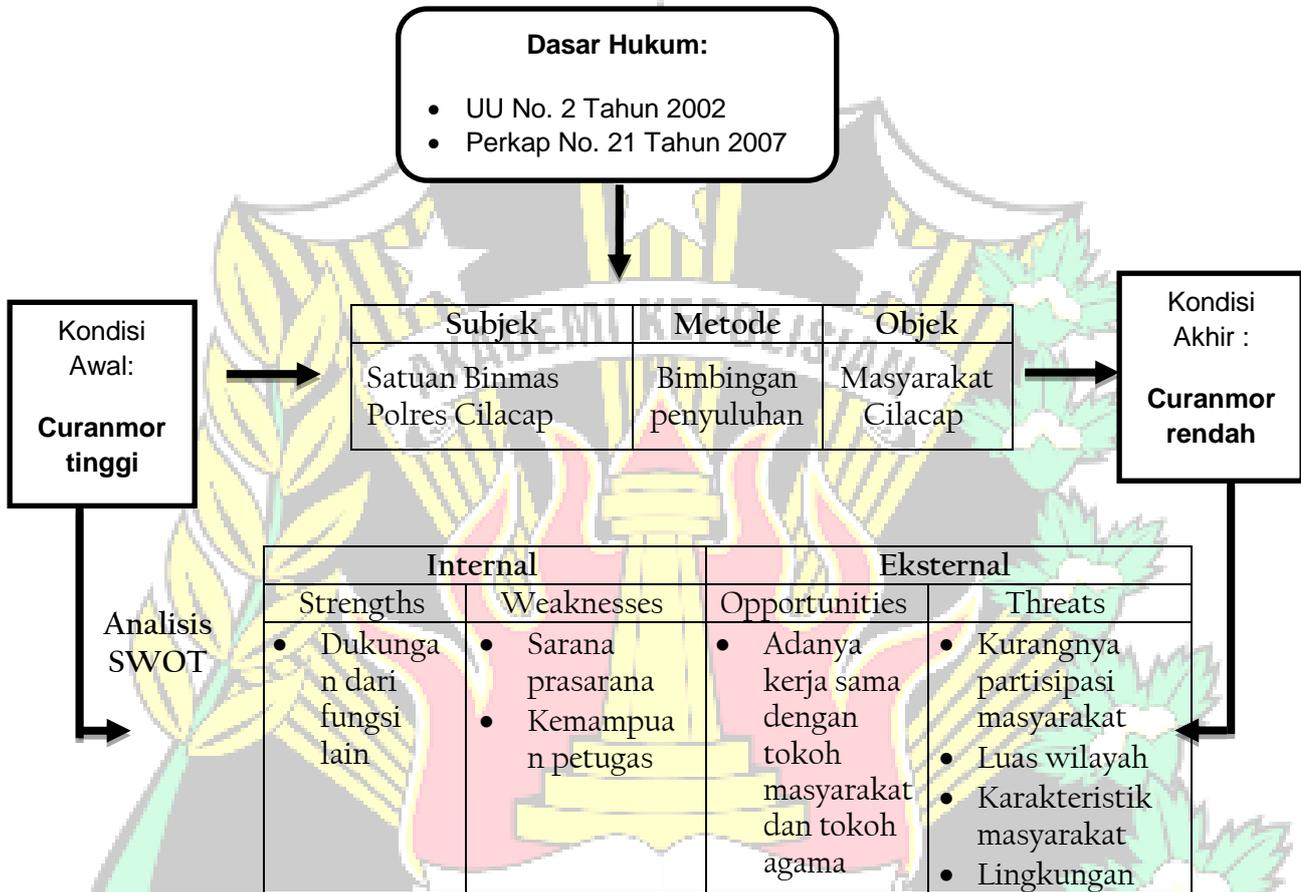
Peneliti menjelaskan bahwa masyarakat Cilacap dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya namun ada perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh sebagian warganya, salah satunya yaitu perbuatan dari pelaku untuk melakukan pencurian bermotor.

Untuk mencegah terjadi pencurian bermotor maka Polri yang dalam hal ini Polres Cilacap melalui Satuan Binmas memiliki tugas pokok yang telah diatur oleh perundang-undangan dalam hal mencegah pencurian kendaraan bermotor. Selain itu upaya pencegahan dilakukan dengan mengedepankan bimbingan penyuluhan sesuai dengan Pekap No. 21 Tahun 2007, salah satu kegiatan yang menjadi tugas satuan Binmas ialah memberikan bimbingan dan penyuluhan tersebut menjadi salah satu alat penyelesaian masalah yang mana akan digunakan dalam penelitian ini. Serta menggunakan konsep-konsep dan teori-teori yang telah ada dan selanjutnya dipakai oleh peneliti sehingga diharapkan dapat membantu Polri dalam mencegah dan mengurangi pencurian kendaraan bermotor yang ada di wilayah Cilacap.

Maka berdasarkan uraian di atas kerangka pemikiran penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3.1
Kerangka Berfikir



METODE

3.1 Pendekatan dan Jenis Penelitian

Untuk menciptakan suatu penelitian yang dapat dipertanggungjawabkan dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti, maka ditentukan suatu pendekatan dan jenis penelitian yang akan digunakan sebagai berikut :

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan oleh peneliti adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna berdasarkan perspektif subjek lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif.

Sehubungan dengan masalah penelitian ini, maka peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, di mana yang dikumpulkan berupa pendapat, tanggapan, informasi, konsep-konsep dan keterangan yang berbentuk uraian dalam mengungkapkan masalah. Penelitian kualitatif adalah rangkaian kegiatan atau proses penyaringan data atau informasi yang bersifat sewajarnya mengenai suatu masalah dalam kondisi, aspek atau bidang tertentu

dalam kehidupan objeknya. Jadi yang dimaksud dengan pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan penelitian data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan tentang orang - orang, perilaku yang dapat diamati sehingga menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.

3.1.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analitis. Data yang diperoleh seperti hasil pengamatan, hasil wawancara, hasil pemotretan, analisis dokumen, catatan lapangan, disusun peneliti di lokasi penelitian, tidak dituangkan dalam bentuk dan angka - angka. Peneliti segera memperkaya informasi, mencari hubungan, membandingkan, menemukan pola atas dasar pola aslinya dan tidak ditampilkan dalam bentuk angka. Hasil analisis data berupa pemaparan mengenai situasi yang diteliti dan disajikan dalam bentuk uraian naratif. Hakikat pemaparan data pada umumnya menjawab pertanyaan - pertanyaan mengapa dan bagaimana suatu fenomena terjadi. Untuk itu peneliti dituntut memahami dan menguasai bidang ilmu yang ditelitinya sehingga dapat memberikan justifikasi mengenai konsep dan makna yang terkandung dalam data.

3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan suatu obyek penelitian yang dijadikan fokus pembatasan ruang lingkup penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan membuat batasan ruang lingkup penelitian, peneliti saat melakukan penelitian di lapangan tidak meneliti semua gejala yang terjadi. Fokus penelitian dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah :

- a. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap.
- b. Faktor - faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap.
- c. Optimalisasi bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap.

3.3 Lokasi penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah di wilayah Polres Cilacap. Penelitian difokuskan pada Satuan Binmas Polres Cilacap. Agar data dapat diperoleh sesuai dengan apa yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka penelitian terfokus kepada satuan Binmas dan masyarakat yang ada di wilayah Cilacap untuk mewujudkan dan meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap pencurian kendaraan bermotor.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif ini didapat dari data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan sumber data / informasi dari data primer yang diperoleh secara langsung kepada sasaran dengan melakukan wawancara kepada sumber informasi, adapun sumber informasi dalam penelitian ini adalah :

- a. Kapolres Cilacap atas nama KBP. Yudho Hermanto, S.IK
- b. Kasat Bimmas Polres Cilacap atas nama AKP. Agus Subiyanto, S.H
- c. KBO Binmas Polres Cilacap atas nama IPTU. Sudriyo
- d. Masyarakat Cilacap antara lain :
 - 1) Andi Syukron

- 2) Sarbini
- 3) Sumaryanti
- 4) Bambang Sugiarto
- 5) Galih Wicaksono
- 6) Rusmadi
- 7) Jamalludin

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan oleh peneliti dengan cara studi dokumen sebagai penunjang kegiatan wawancara dan pengamatan di lapangan sehingga peneliti dapat secara mudah memperoleh informasi tertulis oleh sumber informasi, dalam hal ini Polres Cilacap dan masyarakat daerah Cilacap dalam melakukan pecegahan terhadap terjadinya curanmor di wilayah Cilacap. Disamping itu peneliti menggunakan media internet dan buku - buku yang berhubungan dengan tema ini.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Tahap berikut yang dilakukan peneliti adalah pengumpulan data. Pengumpulan data dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk memperoleh informasi dari responden. Metode pengumpul data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Sumber dalam pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti disebut sumber primer, datanya disebut data primer. Sedangkan sumber data yang diperoleh dari tangan kedua disebut sumber sekunder, datanya disebut data sekunder. Adapun metode yang dipergunakan dalam pengumpulan data adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Secara umum yang dimaksud dengan wawancara adalah cara menghimpun bahan - bahan keterangan yang dilaksanakan dengan tanggung jawab secara lisan, sepihak, berhadapan muka dan dengan arah tujuan yang telah ditentukan. Pengumpulan data serta informasi tersebut peneliti lakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dibuat dalam bentuk pertanyaan - pertanyaan yang fleksibel. Fleksibel mengisyaratkan bahwa pertanyaan - pertanyaan tersebut suatu waktu dapat berubah dalam hal redaksionalnya sesuai kondisi dan situasi pada saat pelaksanaan wawancara, namun tidak menghilangkan substansi dari informasi yang ingin diperoleh.

b. Observasi

Observasi adalah cara menghimpun keterangan yang dilakukan dengan cara mengadakan pengamatan dan pencatatan sistimatis terhadap fenomena - fenomena yang dijadikan obyek pengamatan. "Observasi adalah sebagai metode pengumpulan data banyak digunakan untuk mengamati tingkah laku individu atau terjadinya proses terjadinya suatu kegiatan yang diamati" (Farouk Muhammad dan Djalli, 2005 : 31). Dalam melakukan pengamatan atau observasi ini di lingkungan yang menjadi sasaran penelitian, peneliti menampilkan diri sebagai sosok peneliti, serta berupaya untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan kenyataan dan fakta yang sebenarnya terjadi di lapangan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen diperlukan dalam penelitian yang akan dilaksanakan yaitu dengan meneliti dokumen - dokumen yang berkaitan dengan masalah penelitian. Adapun dokumen -

dokumen tersebut mencakup catatan - catatan dan laporan - laporan yang terkait dengan fokus permasalahan dalam skripsi ini, Surat Perintah, Surat Tugas, Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Data Yang didapatkan tersebut untuk memperkuat apa yang terdapat dalam lapangan saat wawancara dan observasi.

3.6 Validitas Data

“Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian” (Prof. Dr. Sugiyono, 2009 : 117). Untuk menentukan validitas data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik Triangulasi.

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat 3 (tiga) Triangulasi, yaitu :

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dikaitkan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menguji kredibilitas data mengenai pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Pengumpulan data dilakukan dengan pengujian kepada Kapolres Cilacap, Kasat Binmas, anggota satuan Binmas dan masyarakat.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pada penelitian yang dilakukan peneliti digunakan berbagai teknik yaitu wawancara, observasi dan studi dokumen.

c. Triangulasi Waktu

Waktu juga seing mempengaruhi kredibilitas data. Untuk itu dalam rangka pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan - bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan data ke dalam unit - unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain (Sugiyono, 2009 : 88).

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Sugiyono (2009 : 91), bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus - menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam analisis data, yaitu :

1. **Reduksi Data**
Menurut Farouk Muhammad dan Djaali (2005 : 110) Reduksi data adalah bagian dari proses analisis yaitu bentuk analisis untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak dan mengatur data sehingga dapat dibuat kesimpulan. Reduksi data merupakan suatu proses pemilihan dan pemusatan perhatian pada penyederhanaan data - data kasar yang muncul dari catatan di lapangan. Reduksi data dengan demikian merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan - kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.
2. **Penyajian Data**
Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun memberi kemungkinan adanya pemikiran kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat sajian data, peneliti akan memahami apa yang terjadi serta memberikan peluang bagi peneliti untuk mengerjakan sesuatu pada analisis atau tindakan lain berdasarkan pemahamannya. Pada dasarnya sajian data dirancang untuk menggambarkan suatu informasi secara sistematis dan mudah dilihat serta dipahami dalam bentuk keseluruhan sajiannya.
3. **Penarikan Simpulan**
Simpulan akhir ditarik setelah proses pengumpulan data berakhir. Simpulan yang didapatkan perlu diverifikasi atau ditinjau kembali dengan cara melihat dan mempertanyakan kembali secara sepintas dalam catatan lapangan guna memperoleh pemahaman yang lebih tepat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- 4.1 **Deskripsi Fokus Penelitian**
Agar dapat memahami daerah objek penelitian, maka peneliti dalam penelitian ini akan menggambarkan mengenai situasi Kabupaten Cilacap yang menjadi tempat peneliti melakukan penelitian. Selain menggambarkan situasi Kabupaten Cilacap peneliti juga akan menggambarkan kondisi Satuan Binmas Polres Cilacap, serta gambaran umum tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.
- 4.1.1 **Gambaran Umum Kabupaten Cilacap**
Kabupaten Cilacap adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah dengan Ibukotanya adalah Cilacap. Kabupaten Cilacap merupakan daerah terluas di Jawa Tengah.
Secara astronomi Kabupaten Cilacap terletak pada koordinat $108^{\circ} 4' 30'' - 109^{\circ} 30' 30''$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 45' 20''$ garis Lintang Selatan dengan batas - batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Brebes.
 - b. Sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyumas dan Kabupaten Kebumen.
 - c. Sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kabupaten Pangandaran (Jawa Barat).

Gambar 4.1
Peta Kabupaten Cilacap



Sumber : Bag Ops Polres Cilacap

Secara geografi luas wilayah Kabupaten Cilacap adalah 2.253,61 km² yang terdiri dari 24 kecamatan terbagi dalam 15 kelurahan, 269 desa, 2.316 Rw, dan 10.447 Rt. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.1

Data Wilayah Administrasi Kabupaten Cilacap

NO	KECAMATAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	SEX RATIO
1.	Dayeuhluhur	24.675	25.074	49.749	984
2.	Wanareja	48.996	49.498	98.494	990
3.	Majenang	64.043	64.274	128.317	996
4.	Cimanggu	48.739	48.330	97.069	1,008
5.	Karangpucung	46.560	37.265	73.825	981
6.	Cipari	31.538	31.483	63.021	1,002
7.	Sidareja	28.536	29.064	57.600	982
8.	Kedungreja	40.590	40.601	81.191	1,000
9.	Patimuan	23.102	23.246	46.348	994
10.	Gandrungmangu	52.991	52.998	105.989	1,000
11.	Bantarsari	35.042	34.571	69.613	1,014
12.	Kawunganten	39.975	41.362	81.337	996
13.	Jeruklegi	33.577	32.563	66.140	1,031
14.	Kesugihan	48.685	48.052	96.737	1,013
15.	Adipala	39.439	39.255	78.694	1,005
16.	Maos	24.691	24.237	48.928	1,019
17.	Sampang	19.032	18.765	37.797	1,014

18.	Kroya	52.084	52.196	104.280	998
19.	Binangun	33.699	32.831	66.530	1,026
20.	Nusawungu	39.276	38.808	78.084	1,012
21.	Kampung Laut	8.832	8.398	17.230	1,052
22.	Cilacap Selatan	39.667	38.934	78.601	1,019
23.	Cilacap Tengah	42.289	42.057	84.346	1,006
24.	Cilacap Utara	36.141	34.472	70.613	1,048
Jumlah		892.199	888.334	1.780.533	1,004

NO	KECAMATAN	KELURAHAN	DESA	RT	RW
1.	DAYEUHLUHUR	-	14	387	117
2.	WANAREJA	-	16	666	182
3.	MAJENANG	-	17	787	172
4.	CIMANGGU	-	15	446	107
5.	KARANGPUCUNG	-	14	418	107
6.	CIPARI	-	11	363	79
7.	SIDAREJA	-	10	294	54
8.	KEDUNGREJA	-	11	485	93
9.	PATIMUAN	-	7	321	79
10.	GANDRUNGMANGU	-	14	583	88
11.	BANTARSARI	-	8	410	67
12.	KAWUNGANTEN	-	12	468	80
13.	KAMPUNG LAUT	-	4	128	39
14.	JERUKLEGI	-	13	435	83
15.	KESUGIHAN	-	16	687	156
16.	ADIPALA	-	16	515	118
17.	MAOS	-	10	242	60
18.	SAMPANG	-	10	229	72
19.	KROYA	-	17	550	111
20.	BINANGUN	-	17	363	110
21.	NUSAWUNGU	-	17	452	119
22.	CILACAP SELATAN	5	-	445	73
23.	CILACAP TENGAH	5	-	421	80
24.	CILACAP UTARA	5	-	352	70
JUMLAH		15	269	10.447	2.316

Sumber : Intel Dasar Satuan Intelijen Polres Cilacap, 2017

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui bahwa di Kabupaten Cilacap hanya memiliki 15 kelurahan yang terdapat pada Kecamatan Cilacap Utara, Kecamatan Cilacap Tengah dan Kecamatan Cilacap Selatan yang terbagi masing – masing 5 (lima) kelurahan di dalamnya.

Sumber : Intel Dasar Satuan Intelijen Polres Cilacap, 2017

Berdasarkan tabel 4.2 diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk Kabupaten Cilacap pada tahun 2017 sebesar 1.780.533 jiwa tersebar di 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Cilacap. Kecamatan Majenang merupakan Kecamatan yang memiliki penduduk terpadat di Kabupaten Cilacap dengan jumlah 128.317 jiwa, sedangkan Kecamatan Kampung Laut dengan penduduk berjumlah 17.230 jiwa menjadi yang terendah.

Dengan jumlah penduduk yang begitu padat itu, penduduk Kabupaten Cilacap memiliki beragam agama yang dianut didalamnya seperti agama islam, agama kristen, agama khatolik, agama hindu, agama budha, dan lainnya. Berikut adalah rinciannya :

Tabel 4.3
Jumlah Penduduk Kabupaten Cilacap Berdasarkan Agama

NO	AGAMA	JUMLAH PENDUDUK
1.	ISLAM	1.738.535
2.	KRISTEN	16.676
3.	KATOLIK	15.713
4.	HINDU	938
5.	BUDHA	3.491
6.	LAINYA	5.179

Sumber : Intel Dasar Satuan Intelijen Polres Cilacap, 2017

Berdasarkan tabel 4.3 diatas diketahui bahwa penduduk Kabupaten Cilacap didominasi oleh penduduk yang beragama Islam dengan jumlah 1.738.535 jiwa. Selain itu, sekitar 5.179 jiwa beragama lainya. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Cilacap memiliki toleransi beragama yang tinggi.

4.1.2 Gambaran Umum Polres Cilacap

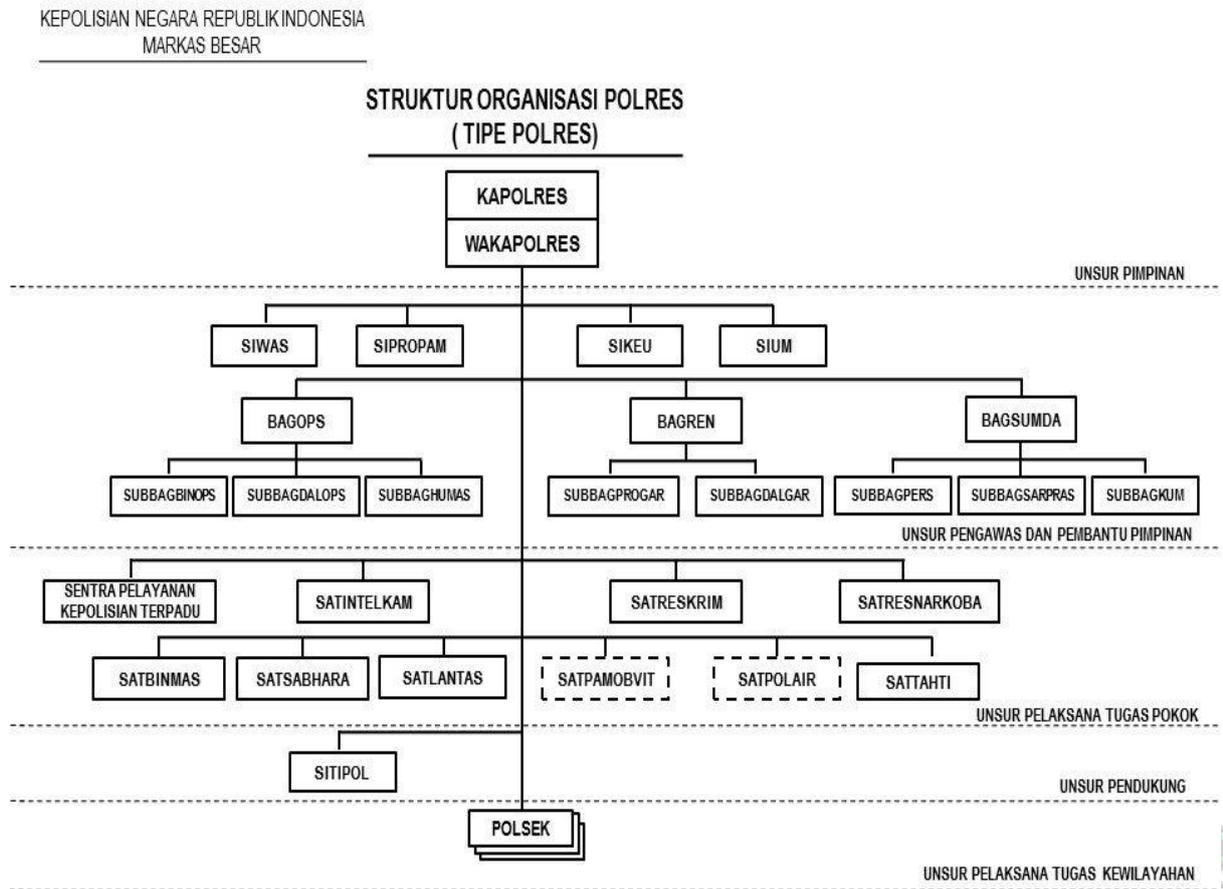
Polres merupakan satuan organisasi Polri yang berkedudukan di wilayah Kota/ Kabupaten yang ada di Indonesia. Seperti contohnya yaitu tempat dimana peneliti melakukan penelitian yaitu Polres Cilacap, Polres Cilacap ini memiliki wilayah hukum di Kabupaten Cilacap dan Pulau Nusakambangan Jawa Tengah. Polres Cilacap ini adalah salah satu dari 35 Polres yang berada di jajaran Polda Jawa Tengah.

Polres Cilacap merupakan salah satu Polres jajaran Jawa Tengah yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mewujudkan dan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Berdasarkan Pasal 7 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Tingkat Polres dan Polsek, susunan organisasi Polres terdiri dari :

- a. Unsur pimpinan
- b. Unsur pengawasan dan pembantu pimpinan
- c. Unsur pelaksana tugas pokok
- d. Unsur pendukung
- e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan

Gambar 4.2
Struktur Organisasi Polres Cilacap

Sumber : Bag Sumda Polres Cilacap



Secara organisasi, Polres Cilacap dipimpin oleh Kapolres yang berpangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) dan Wakapolres dengan pangkat Komisaris Polisi (Kopol). Kapolres dan Wakapolres juga dibantu oleh unsur pengawas dan pembantu pimpinan yaitu Kabag Ops, Kabag Sumda, dan Kabag Ren yang berpangkat Komisaris Polisi (Kopol) dalam menjalankan tugas sehari - harinya.

Tugas teknis diemban oleh masing - masing unsur pelaksana tugas pokok, yaitu satuan Reskrim, Intel, Lantas, Shabara, Narkoba, dan Binmas dimana tiap satuan dikepalai oleh Kepala Satuan berpangkat perwira.

Berdasarkan Lampiran A Nomor 4 Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort, Polres Cilacap yang beranggotakan 1010 dan ditambah dengan adanya personel PNS yang berjumlah 23 orang jadi jumlah seluruh personel Polres Cilacap termasuk dengan PNS berjumlah 1033 personel. Seperti ada di data personel yang berasal dari Urmintu SDM Polres Cilacap sebagai berikut :

Tabel 4.4
Data Personel Polres Cilacap Berdasarkan Kepangkatan Tahun 2016

NO	SATWIL	PANGKAT	JUMLAH
1	POLRES	AKBP	1
		KOMPOL	5
		AKP	19
		IP	28
		BRIG	434
		JUMLAH	487
2	POLSEK	KOMPOL	
		AKP	22
		IP	29
		BRIG	472
		JUMLAH	523
		TOTAL POLRI	1010
3	PNS	III	6
		II	16
		I	1
		JUMLAH	23

Sumber : Urmintu SDM Polres Cilacap, 2017

4.1.3 Gambaran Umum Satuan Binmas Polres Cilacap

Satuan Binmas Polres Cilacap merupakan unsur pelaksana tugas pokok Polres Cilacap yang berada di bawah Kapolres Cilacap. Satuan Binmas Polres Cilacap bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk - bentuk pembinaan swakarsa (pamswakarsa), kepolisian khusus (polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan /atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Cilacap.

Tabel 4.5

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN
1	Agus Subiyanto, SH	AKP / 78081574	Kasat Binmas
2	Sudriyo	IPTU / 65090433	Kaur Binops
3	Kokok Kurnianto, SH	AIPTU / 74100520	Kaurmintu
4	Noor Hidayat	AIPTU / 67060506	Kanit Binpolmas
5	Endang Budiarti	AIPTU / 67100520	Kanit Bintibmas
6	Suhartono	AIPTU / 67120510	Kanit Binkamsa

7	Suwardi	AIPTU / 62070798	Banit
8	Sri Rejeki	AIPTU / 74030478	Banit
9	Kuswandi	AIPDA / 62100236	Banit
10	Second Is U, S.Pd.I, M.M	BRIPKA / 81031277	Banit
11	Esa Nanda Putra	BRIPTU / 89080604	Banit
12	Tuti Agus S	PENGATUR	Banum

Data Personel Satuan Binmas Polres Cilacap

Sumber : Satuan Binmas Polres Cilacap

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah personel satuan Binmas Polres Cilacap sebanyak 11 orang dengan dibantu satu orang sebagai Banum. Dengan jumlah personel yang ada tersebut, satuan Binmas melaksanakan setiap tugas pokok dan fungsinya.

Menurut Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Polres Pasal 51 ayat (3) dicantumkan bahwa satuan Binmas menyelenggarakan fungsi :

- a. Pembinaan dan pengembangan bentuk – bentuk pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembinaan keamanan, ketertiban dan perwujudan kerja sama polres dan masyarakat.
- c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita, dan anak – anak.
- d. Pembinaan teknis, pengkoordinasian, dan pengawasan polsus serta satuan pengamanan (satpam).
- e. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengembangan kemitraan kerja sama antara Polres dengan masyarakat, organisasi, lembaga, instansi, dan /atau tokoh masyarakat.

Satuan Binmas Polres Cilacap berada di bawah Kapolres dan dipimpin oleh seorang Kasat yang bertanggung jawab kepada Kapolres serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada di bawah kendali Wakapolres sesuai dengan Perkap No. 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.

Dalam pelaksanaan tugas satuan Binmas, terdapat unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf sesuai dengan *Job Description* satuan Binmas Polres Cilacap, yaitu :

1. Unsur Pimpinan
Unsur Pimpinan dalam satuan Binmas adalah Kasat Binmas yang bertugas :
 - a. Mengendalikan, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pada satuan Binmas dan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari bertanggung jawab kepada Kapolres di bawah kendali Waka Polres.
 - b. Memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan di lingkungan satuan unit di satuan Binmas Polres Cilacap dan memberi arahan, petunjuk kepada unsur pelaksana Unit Binmas Polsek serta memberikan saran dan pertimbangan kepada Kapolres yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf
Unsur Pembantu Pimpinan dan Pelaksana Staf dalam satuan Binmas adalah Kaur Bin Opsnal yang bertugas melakukan pembinaan administrasi di bidang Operasional kegiatan pembinaan keamanan, ketertiban masyarakat, Pam Swakarsa dan Polmas serta melaksanakan Anev atas pelaksanaannya tugas pembinaan Masyarakat di lingkungan Polres.

3. Unsur Pelaksana Pelayanan dan Staf Khusus
Unsur Pelaksana Pelayanan dan Staf Khusus dalam satuan Binmas adalah Kepala Urusan Administrasi dan ketatausahaan (KaUrmintu) yang bertugas menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketatausahaan di lingkungan satuan Binmas Polres yang dibantu oleh Bintara Administrasi (Bamin) dan Bintara Umum (Banum).
 4. Unsur Pelaksana Utama
 - a. Kepala Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Kanit Binpolmas) yang bertugas membina dan mengembangkan kemampuan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka menyelesaikan masalah - masalah social yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang dibantu oleh Bintara Unit (Banit).
 - b. Kepala Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Kanit Bintibmas) yang bertugas melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhadap komponen masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanita / anak dan dibantu oleh Bintara Unit (Banit).
 - c. Kepala Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Kanit Binkamsa) yang bertugas melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk - bentuk Pamswakarsa dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peranturan perundang - undangan serta melakukan pembinaan teknis, pengkoordinasian dan pengawasan Polsus / Satpam dan dibantu oleh Bintara Unit (Banit).
- 4.1.4 Gambaran Tindakan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Cilacap
- Untuk mengetahui gambaran tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Cilacap, akan ditunjukkan data kriminalitas tahun 2013 - 2016 dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.6
Data Kriminalitas Tahun 2013 - 2016

NO	URAIAN	2013	2014	2015	2016
1	Currat	115	152	61	56
2	Curanmor	34	14	64	52
3	Narkoba	38	46	31	35
4	Perjudian	37	32	45	50
5	Curras	6	6	12	10

Sumber : Bagops Polres Cilacap

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Polres Cilacap dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan penurunan terkait jumlah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor. Hal tersebut dikarena beberapa faktor, seperti :

1. Dari tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi penurunan terhadap jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari 34 kasus menjadi 14 kasus. Hal tersebut dikarenakan pencegahan yang dilakukan oleh Polres Cilacap baik di bidang preemtif, preventif maupun represif dilakukan dengan intensif. Mengingat bahwa Kapolres Cilacap Ajun Komisaris Besar Polisi Ulung Sampurna Jaya, S.IK memiliki program yaitu memberikan *reward* kepada setiap satuan yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. Kemudian dengan adanya *reward* tersebut

setiap satuan yang ada di Polres Cilacap menjadi terdorong dan saling bekerja sama melakukan pencegahan terhadap terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sebagaimana tugas pokok dan peranannya masing – masing.

2. Dari tahun 2014 ke tahun 2015 terjadi peningkatan yang sangat tinggi terhadap jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor dari 14 kasus menjadi 64 kasus. Hal tersebut dikarenakan pada saat itu terjadinya pergantian Kapolres Cilacap yang mana AKBP. Ulung Sampurna Jaya, S.IK digantikan oleh AKBP. Yudho Hermanto, S.IK. Sejalan dengan itu, beberapa program yang telah dibuat oleh AKBP. Ulung Sampurna Jaya, S.IK tidak diteruskan oleh Kapolres Cilacap yang baru yaitu AKBP. Yudho Hermanto, S.IK salah satunya adalah tentang pemberian *reward* terhadap setiap satuan yang melaksanakan tugasnya dengan baik dan maksimal. Dengan tidak diteruskannya program tersebut menyebabkan setiap personel yang ada di masing – masing satuan kurang termotivasi sehingga pelaksanaan pencegahan terhadap tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dirasa kurang maksimal.
3. Dari tahun 2015 ke tahun 2016 kembali terjadi penurunan terhadap jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mana dari 64 kasus menjadi 52 kasus. Meskipun penurunan terhadap jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi tidak begitu signifikan. Namun, hal tersebut sudah menunjukkan terjadinya peningkatan terhadap kinerja yang dilakukan oleh setiap personel yang ada di Polres Cilacap.

Dengan masih terjadinya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dari tahun ke tahun menunjukkan bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih menjadi *trend* dalam hal tindak kriminalitas yang terjadi di Kabupaten Cilacap dan sangat meresahkan masyarakat.

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Cilacap kebanyakan terjadi karena adanya kesempatan untuk melakukan hal tersebut, selain itu juga karena kelalaian dari para pemilik kendaraan bermotor. Kasat Binmas Polres Cilacap, AKP Agus Subiyanto, SH (wawancara, 6 Maret 2017) yaitu :

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Cilacap ini kebanyakan terjadi karena kelalaian dari para pemilik kendaraan bermotor itu sendiri. Para pelaku pencurian kendaraan bermotor biasanya memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan kejahatan.

Kelalaian masyarakat tersebut yang membuat mereka menjadi korban yang mudah bagi para pelaku kejahatan. Masyarakat yang kurang memperhatikan keamanan kendaraannya sendiri ketika akan meninggalkannya. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya peran dari masyarakat dalam meminimalisir terjadinya kejahatan terutama pencurian kendaraan bermotor. Dibawah akan dilampirkan tabel data tentang modus operandi kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi Kabupaten Cilacap dari tahun 2013 - 2016 :

Tabel 4.7

Data Modus Operandi Kejahatan Curanmor dari Tahun 2013 – 2016

Sumber : Bagops Polres Cilacap

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa pada tahun 2013 dan tahun 2015 modus operandi yang paling tinggi adalah kelalaian korban. Hal ini menunjukkan bahwa kurang adanya kesadaran masyarakat akan keamanan kendaraannya sendiri.

4.2 Bimbingan Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Cilacap

Dalam pelaksanaan penelitian, kegiatan bimbingan penyuluhan telah dilaksanakan oleh satuan Binmas Polres Cilacap dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya masalah pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Polres Cilacap.

4.2.1 Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Cilacap

Satuan Binmas Polres Cilacap sesuai dengan tugas pokoknya bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan penyuluhan masyarakat, pemberdayaan perpolisian masyarakat (polmas), melaksanakan koordinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap bentuk – bentuk pembinaan swakarsa (pamswakarsa), kepolisian khusus (polsus), serta kegiatan kerja sama dengan organisasi, lembaga, instansi dan /atau tokoh masyarakat guna peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundang - undangan serta terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Cilacap.

Secara umum pelaksanaan tupoksi satuan Binmas diatas diselenggarakan secara terkoordinasi, terencana selaras dengan kewenangan yang telah ditetapkan baik oleh unsur staf pimpinan maupun unsur pelaksana.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap sudah dilaksanakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah dibuat oleh satuan Binmas Polres Cilacap. Sesuai dengan pernyataan Kaurbinops

NO	Tahun	Modus Operandi			
		Kelalaian Korban	Merusak Kunci	Merusak Rumah	Lain- Lain
1	2013	34	-	-	-
2	2014	4	6	1	3
3	2015	37	14	9	4
4	2016	15	29	8	-

satuan Binmas Polres Cilacap, IPTU Sudriyo (wawancara, 6 Maret 2017) “Bimbingan penyuluhan yang dilaksanakan sudah sesuai dengan SOP yang telah dibuat oleh Satbinmas Polres Cilacap”. Ruang lingkup SOP ini meliputi pelaksanaan tugas pokok fungsi dan peran satuan Binmas dalam pelaksanaan pembinaan dan penyuluhan yang meliputi unsur-unsur yang dilibatkan, sarana prasarana, metode yang digunakan serta hal-hal yang diperhatikan dalam pelaksanaan penyuluhan.

Dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan tentang pencegahan terjadinya pencurian kendaraan bermotor, satuan Binmas Polres Cilacap melibatkan seluruh personel yang ada berjumlah sebelas petugas yaitu sebagai berikut :

- a. Satu Pama / AKP sebagai Kasat
- b. Satu Pama / IPTU sebagai Kaurbinops
- c. Satu Bintara tinggi / AIPTU sebagai Kaurmintu
- d. Satu Bintara tinggi / AIPTU sebagai Kanit Binkamsa
- e. Satu Bintara tinggi / AIPDA sebagai Kanit Bintibmas
- f. Satu Bintara tinggi / AIPDA sebagai Banit
- g. Dua Brigadir / BRIPKA sebagai Banit
- h. Dua Brigadir / BRIPTU sebagai Bamin
- i. Satu PNS / Pengda sebagai Banum

Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan, anggota satuan Binmas menjalankan tugasnya berdasarkan pada :

1. Permintaan persurat dari Masyarakat / Instansi, prosedur pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Surat Permintaan dari masyarakat / instansi tersebut dimasukkan ke buku agenda oleh Bintara Administrasi, melalui Kaurmintu surat diajukan kepada Kasat;
 - b. Setelah surat didisposisi oleh Kasat, kanit / yang ditunjuk sesuai disposisi melaksanakan koordinasi ke instansi / masyarakat yang membutuhkan dengan dilengkapi surat tugas dan selanjutnya melaporkan kepada Kasat tentang hasil koordinasi dimaksud;
 - c. Bintara Administrasi melalui Kaurmintu dan atas petunjuk Kasat membuat rencana kegiatan sesuai waktu dan kekuatan personel;
 - d. Bintara Administrasi dibantu Bintara Umum atau Bintara Unit untuk membuat surat tugas sesuai waktu dan data personel yang telah ditentukan;
 - e. Kanit / pelaksana yang ditunjuk, mempersiapkan materi sesuai dengan permasalahan yang akan disampaikan;
 - f. Sebelum berangkat, Kaurbinops melakukan arahan / APP terhadap petugas yang akan melaksanakan bimbingan penyuluhan.
2. Permintaan melalui Telepon atau Lisan, prosedur pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Petugas / anggota yang menerima permintaan segera melaporkan kepada Kasat tentang identitas, permasalahan yang diterima;
 - b. Personel yang ditunjuk / diperintah Kasat untuk melakukan koordinasi ke instansi / masyarakat yang membutuhkan Polri segera melaporkan kepada Kaurmintu untuk dibuatkan rencana kegiatan dan surat tugas;
 - c. Personel yang melakukan koordinasi melaporkan hasilnya kepada Kasat;
 - d. Kaurmintu melalui Bintara Administrasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan kegiatan;
 - e. Kanit / personel yang ditunjuk mempersiapkan materi sesuai arahan Kasat;
 - f. Pelaksanaan sebelum berangkat diberi arahan / APP oleh Kaurbinops mengenai materi dan tata cara pelaksanaan Binluh.
3. Petugas turun ke Masyarakat / Instansi, prosedur pelaksanaannya sebagai berikut :
 - a. Kanit atas petunjuk Kaurbinops menentukan sasaran / audien yang dipandang perlu dengan memperhatikan aspek kemanfaatan dan kebutuhan masyarakat / instansi dimaksud;
 - b. Kanit / personel yang dimaksud melaporkan kepada Kasat perihal sasaran kegiatan penyuluhan dengan menjelaskan maksud tujuan serta latar belakang yang akan dibinluh;

- c. Setelah ada persetujuan dari Kasat, selanjutnya personel tersebut melaporkan kepada Kaurbinops / Kaurmintu untuk dibuatkan perencanaan;
 - d. Kaurmintu membuat rencana kegiatan dan surat tugas untuk pelaksanaan Binluh;
 - e. Sebelum berangkat melaksanakan tugas, pelaksana melaporkan kepada Kasat dan menerima arahan dari Kasat maupun Kaurbinops.
4. Bersifat Insidental, maksudnya petugas menerima informasi tentang sering terjadi pencurian kendaraan bermotor atau gangguan kamtibmas lainnya. Perosedur pelaksanaannya sebagai berikut :
- a. Personel yang menerima informasi baik dari internal Polri maupun dari lintas sektoral segera melaporkan kepada Kasat perihal permintaan / kejadian dimaksud;
 - b. Kaurmintu membuat surat tugas sesuai dengan personil yang diperintahkan melakukan tugas;
 - c. Pelaksana sebelum berangkat menerima arahan dari Kasat maupun Kaurbinops.

Dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan personel satuan Binmas dibantu dengan sarana prasarana untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan sehingga tujuan dapat tercapai. Berikut adalah sarana prasarana yang digunakan satuan Binmas Polres Cilacap dalam melaksanakan kegiatan bimbingan penyuluhan :

- a. Buku - Buku Refrensi, Undang - Undang, Petunjuk/ Juklap/ Juknis/ Perkap/ Kep. Kapolri maupun materi lainnya yang ada di satuan Binmas Polres Cilacap;
- b. Bagi petugas Administrasi :
 1. 5 (lima) Unit Komputer yang ada pada Satbinmas Polres Cilacap;
 2. Meja dan kursi ada pada ruangan satuan Binmas;
 3. ATK / alat tulis kantor / kertas / tinta / pensil yang ada pada satuan Binmas;
 4. Buku - buku agenda / verbal maupun almari arsip yang ada pada satuan Binmas;
- c. Bagi Petugas Pelaksana :
 1. Menggunakan materi yang ada pada satuan Binmas;
 2. Menggunakan megaphone inventaris satuan Binmas;
 3. Menggunakan kendaraan inventaris yang ada;
 4. Menggunakan ATK yang ada pada satuan Binmas.

Untuk mendukung sarana prasarana yang ada, anggota satuan Binmas Polres Cilacap dalam pelaksanaan tugasnya selalu berpedoman pada prinsip-prinsip kegiatan satuan Binmas. Adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain :

- a. Prinsip Satu Pintu dimaksud bahwa semua kegiatan, perencanaan, informasi mengenai pembinaan dan penyuluhan diterima / dilaporkan oleh/ kepada Kasat binmas.
- b. Prinsip Obyektifitas dimaksud bahwa informasi / kegiatan yang dilaksanakan sesuai kenyataan berdasarkan kriteria yang berdasarkan perencanaan.
- c. Prinsip Efektif, Efisien dan Ekonomis dimaksud agar pelaksanaan kegiatan tepat sasaran, hemat dari segi sumber daya, tenaga, biaya, dan tepat waktu sesuai ketentuan yang ada.
- d. Prinsip Akuntabilitas dan Transparan dimaksud bahwa kegiatan yang dilaksanakan satuan Binmas harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan yang ada.
- e. Prinsip Koordinasi dimaksud adalah segala kegiatan yang dilaksanakan pada satuan Binmas selalu berkoordinasi baik dengan internal maupun lintas sektoral.

f. Prinsip Kemitraan dimaksud adalah semua kegiatan baik keluar maupun kedalam selalu mengutamakan kemitraan yang berasaskan kesadaran.

Sasaran dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan terkait pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap adalah para pengendara kendaraan bermotor, masyarakat dan juga kepada pelajar. Meskipun ada sebagian pelajar yang tidak boleh mengendarai kendaraan tetapi mereka bisa menyampaikannya kepada orang tua mereka agar selalu bersikap waspada dan berhati-hati.

Untuk metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas adalah sebagai berikut :

1. Dengan ceramah kepada masyarakat dengan didampingi oleh Tokoh Masyarakat (Tomas).
2. Melakukan tanya jawab seputar kamtibmas.
3. Adanya diskusi dengan masyarakat / instansi lain terkait dengan kejadian pencurian kendaraan bermotor serta mencari solusi atau jalan keluarnya.
4. Melakukan pemasangan spanduk atau *leaflet* tentang kewaspadaan masyarakat terhadap pencurian kendaraan bermotor di area kawasan ramai dan pertokoan.
5. Memaksimalkan peran tokoh masyarakat (Tomas) dan tokoh agama (Toga) untuk menyampaikan pesan-pesan kamtibmas tentang kerawanan pencurian kendaraan bermotor.
6. Menggunakan radio sebagai media komunikasi pendukung dalam menyampaikan pesan-pesan kamtibmas.

Dengan menggunakan beberapa metode dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan, Kasat selaku pimpinan di satuan Binmas tidak langsung begitu saja memerintahkan anggotanya melakukan tugas pelaksanaan, tetapi memerintahkan anggotanya untuk selalu memperhatikan hal-hal yang akan menjadi masalah dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan apabila dihiraukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan tersebut yaitu :

- a. Memperkenalkan diri;
- b. Menyampaikan materi / permasalahan secara keseluruhan, pemecahannya dan langkah-langkah antisipasinya;
- c. Menggunakan bahasa yang mudah dipahami
- d. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;
- e. Penggunaan alat peraga, alins dan atau alogins yang tersedia;
- f. Kuasai audiens dan ilmu komunikasi;
- g. Manfaatkan waktu seefisien mungkin; dan
- h. Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah.

4.2.2 Analisis Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan oleh Satuan Binmas Polres Cilacap Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat merupakan peraturan yang dibuat sebagai pedoman dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan terdapat pada Bab IV Perkap No. 21 Tahun 2007 sebagai berikut :

Pasal 8

Persiapan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas meliputi:

- a. menyiapkan materi;
- b. mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait;
- c. menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai

- permasalahan;
- d. menyusun tim penyelenggara kegiatan; dan
- e. menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau alat penolong instruksi (alongins).

Pasal 9

Hal-hal yang perlu dilakukan petugas dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas antara lain:

- a. memperkenalkan identitas diri;
- b. menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya;
- c. penggunaan bahasa yang mudah dipahami;
- d. metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;
- e. gunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia;
- f. kuasai *audiens* dan ilmu komunikasi;
- g. manfaatkan waktu seefisien mungkin; dan
- h. alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah.

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan Kamtibmas wajib memperhatikan:

- a. tempat dan waktu yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan lingkungan tempat bimbingan penyuluhan dilaksanakan.
- b. petunjuk dan saran-saran dari pejabat setempat;
- c. pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun tertulis; dan
- d. keikutsertaan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Pasal 11

- (1) Analisa dan evaluasi kegiatan bimbingan dan penyuluhan dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pemantauan;
 - b. pencatatan;
 - c. penilaian; dan
 - d. pelaporan berdasarkan hasil.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dimulai sejak awal kegiatan, selama proses kegiatan berlangsung, dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai.
- (3) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan umpan balik untuk mengetahui informasi kemajuan kegiatan.
- (4) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kegiatan yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, didasarkan pada hasil pemantauan, pencatatan, dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 diatas merupakan dasar bagi seluruh anggota Polri dalam pelaksanaan penyuluhan. Dari Pasal-Pasal

diatas dapat dianalisis bahwa Pasal 8 menjelaskan mengenai kegiatan perencanaan (*planning*), Pasal 9 menjelaskan mengenai kegiatan pelaksanaan (*actuating*), Pasal 10 menjelaskan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan, dan Pasal 11 menjelaskan mengenai analisa dan evaluasi kegiatan (*controlling*).

Untuk menganalisis pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan satuan Binmas Polres Cilacap digunakan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 sebagai berikut :

a. *Planning* (perencanaan)

Sesuai dengan Perkap No. 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan terdapat lima unsur pada tahap perencanaan yang ada dalam Pasal 8, yaitu :

1. Menyiapkan materi
Satuan Binmas dituntut untuk menyiapkan materi sesuai dengan permasalahan sebelum pelaksanaan penyuluhan dilakukan. Namun pada kenyataannya pelaksanaan yang dilakukan satuan Binmas Polres Cilacap tidak selalu menggunakan materi untuk dipaparkan. Menurut Kaurbinops, IPTU Sudriyo (wawancara, 6 Maret 2017) “Materi yang digunakan biasanya materi yang telah ada, tetapi biasanya petugas tidak menggunakan materi karena petugas telah menguasai”. Berdasarkan pernyataan Kaurbinops tersebut diketahui bahwa petugas telah mempunyai banyak pengalaman di lapangan, sehingga pelaksanaan bimbingan penyuluhan terkandung mereka tidak menyiapkan materi karena materi telah mereka kuasai.
2. Mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait
Satuan Binmas dalam pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui telepon atau datang secara langsung dengan panitia/pihak sasaran untuk meminta atau mengkonfirmasi terkait waktu, tempat, materi, jumlah peserta dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan tersebut.
3. Menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan
Berdasarkan SOP penyuluhan yang disusun oleh satuan Binmas Polres Cilacap, bahwa pada tahap perencanaan tidak disebutkan untuk menyiapkan petugas yang menguasai permasalahan. Pelaksanaan bimbingan penyuluhan dapat dilakukan oleh seluruh anggota satuan Binmas Polres Cilacap walaupun petugas tersebut belum memahami materi yang akan disampaikan.
4. Menyusun tim penyelenggara kegiatan
Berdasarkan SOP penyuluhan yang disusun oleh satuan Binmas Polres Cilacap, tidak disebutkan mengenai penyusunan tim penyelenggara kegiatan sebelum dilaksanakannya kegiatan penyuluhan. Menurut Kaurbinops satuan Binmas Polres Cilacap, IPTU Sudriyo (wawancara, 6 Maret 2017) “Pada saat pelaksanaan tugas seperti penyuluhan dan kegiatan lainnya, maka petugas Satbinmas yang berada dikantorlah yang melaksanakan kegiatan itu”. Berdasarkan pernyataan tersebut diketahui bahwa pada tahap perencanaan satuan Binmas tidak menyusun tim penyelenggara kegiatan sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan.
5. Menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (*alins*), dan/atau penolong instruksi (*alongins*)
Berdasarkan SOP penyuluhan yang disusun satuan Binmas Polres Cilacap, dijelaskan bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan untuk menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (*alins*), dan/atau penolong instruksi (*alongins*) serta memperhatikan penggunaannya. Berdasarkan penelitian di lapangan bahwa pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang

dilakukan oleh satuan Binmas tidak menggunakan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau penolong instruksi (alongins). Hal ini sesuai dengan pernyataan yang disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Cilacap, AKP Agus Subiyanto, SH (wawancara, 6 Maret 2017) “Dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan kita lakukan secara langsung, tidak menggunakan alat-alat peraga, alins, dan/atau alongins kecuali di tempat pelaksanaan telah disiapkan”.

Dari kelima unsur yang telah dijelaskan diatas, diketahui bahwa perencanaan yang dilaksanakan oleh satuan Binmas Polres Cilacap masih belum optimal. Terdapat beberapa kendala yang menghambat persiapan pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan, yaitu tidak menyiapkan materi, tidak menyiapkan petugas pelaksana bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan, dan tidak menyusun tim penyelenggara kegiatan. Berikut tabel analisis tahap perencanaan :

Tabel 4.8
Analisis Tahap Perencanaan

NO	TAHAP PERENCANAAN	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI
1	Menyiapkan materi	Tidak terpenuhi
2	Mengkoordinasikan dengan pejabat dan instansi terkait	Terpenuhi
3	Menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan	Tidak terpenuhi
4	Menyusun tim penyelenggara kegiatan	Tidak terpenuhi
5	Menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau penolong instruksi (alongins)	Tidak terpenuhi

Sumber : Data dianalisis oleh peneliti

b. *Actuating* (pelaksanaan)

Berdasarkan Perkap No. 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan terdapat delapan unsur pada tahap pelaksanaan yang ada dalam Pasal 9, yaitu :

1. Memperkenalkan diri.

Satuan Binmas pada pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan terlebih dahulu memperkenalkan diri serta menjelaskan maksud dan tujuan diadakannya bimbingan penyuluhan tersebut.

2. Menyampaikan materi / permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya.

Berdasarkan SOP yang disusun oleh satuan Binmas Polres Cilacap pada tahap pelaksanaan penyuluhan hanya dijelaskan tentang penyampaian pesan, informasi dan permasalahan kamtibmas. Tidak dijelaskan tentang cara-cara pemecahan ataupun langkah-langkah antisipasi. Berdasarkan pelaksanaan di lapangan petugas bimbingan penyuluhan menyampaikan materi mengenai permasalahan, cara pemecahan dan langkah-langkah antisipasi hanya secara umum dan tidak telalu mendetail.

3. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami

Penggunaan bahasa yang digunakan oleh petugas dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan umumnya menggunakan bahasa Indonesia. Akan tetapi, mengingat masyarakat Cilacap cenderung berbahasa daerah Cilacap sehingga petugas juga harus menyesuaikan menggunakan bahasa daerah Cilacap. Hal

- tersebut tidak menjadi kendala bagi petugas karena mereka telah bertugas selama puluhan tahun di Jawa Tengah terkhusus di Kabupaten Cilacap.
4. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi. Berdasarkan SOP penyuluhan yang disusun oleh satuan Binmas Polres Cilacap, metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan secara umum dilaksanakan secara langsung atau tatap muka (*face to face communication*). Selain itu, digunakan juga media cetak maupun media elektronik.
 5. Gunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia. Berdasarkan SOP penyuluhan yang disusun oleh satuan Binmas Polres Cilacap, bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan dilakukan dengan menggunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia. Hasil temuan peneliti bahwa dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan satuan Binmas Polres Cilacap tidak menggunakan alat peraga, alins dan/atau alongins dikarenakan kondisinya rusak.
 6. Kuasai *audience* dan ilmu komunikasi. Penguasaan terhadap *audience* dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan sangatlah penting sebab apabila *audience* dapat dikuasai pelaksanaan bimbingan penyuluhan akan berjalan dengan baik dan tujuan bimbingan penyuluhan juga akan tercapai. Untuk mendukung itu tentunya petugas harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Pada pelaksanaannya di lapangan para petugas telah memiliki kemampuan itu, mengingat mereka telah berpengalaman dalam melaksanakan tugas di lapangan yang secara langsung besentuhan dengan masyarakat.
 7. Memanfaatkan waktu seefisien mungkin. Seperti yang telah dijelaskan pada tahap perencanaan sebelumnya bahwa untuk waktu pelaksanaan ditentukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati pada saat koordinasi. Dan biasanya waktu yang disediakan juga sangatlah cukup bagi petugas satuan Binmas untuk menyampaikan materi termasuk juga tanya jawab bagi para *audience* yang dirasa belum jelas. Sehingga untuk pemanfaatan waktu secara efisien telah terpenuhi.
 8. Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk waktu pelaksanaan telah ditentukan dan disepakati melalui koordinasi yang dilakukan pada tahap perencanaan. Waktu yang disediakan juga sangatlah cukup bagi petugas baik untuk menyampaikan materi ataupun melakukan tanya jawab.

Berdasarkan kedelapan unsur tersebut, terdapat unsur yang tidak terpenuhi yaitu menyampaikan materi / permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya. Sehingga tahap pelaksanaan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap belum optimal.

Tabel 4.9
Analisis Tahap Pelaksanaan

NO	TAHAP PELAKSANAAN	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI
1.	Memperkenalkan diri	Terpenuhi
2.	Menyampaikan materi / permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan	Tidak Terpenuhi

	langkah-langkah antisipasinya	
3.	Penggunaan bahasa yang mudah dipahami	Terpenuhi
4.	Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi	Terpenuhi
5.	Menggunakan alat peraga alins dan/atau alongins yang tersedia	Tidak Terpenuhi
6.	Kuasai <i>audience</i> dan ilmu komunikasi	Terpenuhi
7.	Memanfaatkan waktu seefisien mungkin	Terpenuhi
8.	Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah	Terpenuhi

Sumber : Data dianalisis oleh peneliti

Kemudian pada Pasal 10 Perkap No. 21 Tahun 2007 menjelaskan hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan, antara lain :

1. Tempat dan waktu yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan lingkungan tempat bimbingan penyuluhan dilaksanakan. Berdasarkan SOP penyuluhan yang telah disusun oleh satuan Binmas Polres Cilacap pada tahap perencanaan sebelumnya telah ditentukan terkait waktu serta tempat pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat.
2. Petunjuk dan saran-saran dari pejabat setempat. Telah dijelaskan sebelumnya dalam tahap perencanaan bahwa selalu ada koordinasi yang dilakukan antar pejabat atau instansi terkait dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas Polres Cilacap. Penentuan kegiatan bimbingan penyuluhan tersebut tidak hanya dilaksanakan atas keputusan satuan Binmas itu sendiri. Namun, atas dasar petunjuk dan saran-saran dari pejabat atau instansi dalam hal pelaksanaan bimbingan penyuluhan.
3. Pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun tertulis. Telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam tahap perencanaan sebelum satuan Binmas melaksanakan kegiatan bimbingan penyuluhan pasti melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan pejabat atau instansi dalam hal kegiatan bimbingan penyuluhan tersebut. Berdasarkan SOP pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang disusun oleh satuan Binmas Polres Cilacap bahwa sebelum pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan, petugas terlebih dahulu melakukan koodinasi atau pelaporan melalui telepon atau datang secara langsung dengan pejabat setempat untuk meminta dan mengkonfirmasi masalah waktu, tempat, materi, jumlah peserta, dan fasilitas yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan.
4. Keikutsertaan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat. Tujuan keikutsertaan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan adalah agar mempermudah petugas dalam melaksanakan kegiatan serta tercapainya tujuan dari kegiatan bimbingan penyuluhan tersebut.

- c. *Controlling* (pengawasan / pengendalian)
George R. Terry (2009:18) menyatakan bahwa “*Controlling* mencakup kelanjutan tugas untuk melihat apakah kegiatan-kegiatan dilaksanakan sesuai rencana”. Berdasarkan Perkap No. 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan terdapat tahap *controlling* yang terdapat dalam Pasal II, yaitu :
1. Pemantauan
Pemantauan dilakukan oleh Kasat Binmas selaku pimpinan satuan Binmas Polres Cilacap. Pemantauan dilakukan secara langsung dan tidak langsung melalui dokumentasi. Berdasarkan Perkap No. 21 Tahun 2007 Pasal II ayat (2) bahwa pemantauan dilakukan mulai sejak awal kegiatan, selama proses kegiatan berlangsung, dan setelah kegiatan dengan tujuan sasaran tercapai. Pada pelaksanaannya di lapangan, Kasat Binmas jarang hadir pada kegiatan bimbingan penyuluhan tersebut dan melakukan pemantauan secara langsung. Sehingga dilakukan pemantauan secara tidak langsung yaitu melalui dokumentasi. Dokumentasi yang dilakukan biasanya berupa foto yang kemudian dikirimkan menggunakan alat komunikasi atau *handphone* melalui aplikasi *Whatsapp* dan Telegram.
 2. Pencatatan
Berdasarkan Perkap No. 21 Tahun 2007 Pasal II ayat (3) bahwa pencatatan merupakan umpan balik untuk mengetahui informasi kemajuan kegiatan. Pada pelaksanaannya, untuk pencatatan sendiri tidak dilakukan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Kasat Binmas Polres Cilacap, AKP Agus Subiyanto, SH (wawancara, 6 Maret 2017) “Untuk pencatatan sendiri kita tidak melakukan, karena pengawasan yang kita lakukan biasanya menunggu laporan dari petugas yang ada di lapangan”.
 3. Penilaian
Berdasarkan Perkap No. 21 Tahun 2007 Pasal II ayat (4) bahwa penilaian merupakan kegiatan yang dilakukan dari awal sampai dengan akhir untuk mengetahui pencapaian target yang telah ditetapkan. Dalam hal ini Kasat Binmas selaku pimpinan yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penyuluhan melakukan penilaian tentang pelaksanaan kegiatan. Penilaian tersebut disampaikan pada tahap evaluasi atau setelah kegiatan penyuluhan selesai.
 4. Pelaporan berdasarkan hasil
Berdasarkan Perkap No. 21 Tahun 2007 Pasal II ayat (5) bahwa pelaporan didasarkan pada hasil pemantauan, pencatatan, dan penilaian. Pelaporan dilakukan dengan membuat laporan pelaksanaan tugas. Pada pelaksanaannya petugas membuat laporan pelaksanaan tugas dan diserahkan kepada Kasat Binmas selaku pemimpin satuan Binmas Polres Cilacap.
Berdasarkan keempat unsur tersebut, terdapat unsur yang tidak terpenuhi yaitu pencatatan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.10
Analisis Tahap Pengawasan

NO	TAHAP PENGAWASAN	TERPENUHI / TIDAK TERPENUHI
1	Pemantauan	Tidak terpenuhi
2	Pencatatan	Tidak terpenuhi
3	Penilaian	Terpenuhi
4	Pelaporan berdasarkan hasil	Terpenuhi

Sumber : Data analisis oleh peneliti

4.3 Faktor - faktor yang Mempengaruhi Bimbingan Penyuluhan oleh Satuan Binmas dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Cilacap

Satuan Binmas Polres Cilacap telah melakukan kegiatan bimbingan penyuluhan ke berbagai kalangan masyarakat Kabupaten Cilacap sebagai bentuk upaya pencegahan terjadi pencurian kendaraan bermotor. Setiap pelaksanaan tugas tentu akan dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Sama halnya dengan pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap juga dipengaruhi oleh berbagai faktor. Dalam hal ini penulis akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap, khususnya dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan menggunakan Analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, dan Threats*).

Analisis SWOT merupakan analisis yang melihat suatu kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*) yang ada dalam suatu pelaksanaan tugas, sehingga dapat mengetahui faktor apa saja yang dapat mempengaruhi. Berdasarkan hasil temuan peneliti pada saat melakukan penelitian, penjabaran mengenai aspek-aspek dalam analisis SWOT tersebut yaitu :

4.3.1 Faktor Internal

Secara internal Satuan Binmas Polres Cilacap tentu memiliki kekuatan dan kelemahan dalam pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan. Kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh satuan Binmas Polres Cilacap antara lain :

a. Kekuatan (*Strength*)

Faktor yang menjadi pendukung dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas berupa adanya dukungan dari fungsi lain. Satuan Binmas Polres Cilacap sesuai dengan tugas pokoknya melakukan kegiatan preemtif dengan melakukan bimbingan penyuluhan dibantu oleh fungsi Sabhara dan fungsi Reskrim dalam kegiatan preventif dan respresif. Menurut Kasat Binmas Polres Cilacap, AKP Agus Subiyanto, SH (wawancara, 6 Maret 2017)

Polres Cilacap dalam menangani tindak pidana pencurian kendaraan bermotor selain dilakukan Satuan Binmas dengan melakukan pencegahan dibidang preemtif dibantu juga Satuan Sabhara dengan melakukan patroli dan Satuan Reskrim dalam hal penindakan.

Dengan koordinasi yang baik antar fungsi teknis dapat mempermudah penanganan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor sesuai dengan *job description* masing - masing fungsi teknis.

b. Kelemahan (*Weakness*)

Berdasarkan temuan peneliti, secara internal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan adalah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan Binmas. Sarana prasarana merupakan hal penting dalam mendukung pelaksanaan tugas satuan Binmas dalam melaksanakan kegiatan bimbingan penyuluhan. Berdasarkan hasil temuan peneliti bahwa sarana dan prasarana yang dimiliki oleh satuan Binmas dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.11
Daftar Sarana Prasarana Satuan Binmas Polres Cilacap

NO	INVENTARIS	JUMLAH	KONDISI		KET
			BAIK	RUSAK	
1	Ranmor Roda 4	1	✓		
2	Ranmor Roda 2	4	✓		
3	Meja	5		✓	1 Buah
4	Kursi	15		✓	5 Buah
5	Meja Komputer	2	✓		
6	Papan Tulis	2	✓		
7	Panel Data	2	✓		
8	Komputer	4	✓		
9	Laptop	2		✓	1 Buah
10	Proyektor	1		✓	1 Buah
11	AC	1	✓		
12	Televisi	1	✓		

Sumber : Satuan Binmas Polres Cilacap dan dianalisis oleh peneliti

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa barang inventaris yang dimiliki satuan Binmas Polres Cilacap rusak seperti: meja, kursi, laptop, dan proyektor.

Selain sarana prasarana, yang menjadi penghambat pelaksanaan bimbingan penyuluhan adalah kemampuan petugas. Kemampuan petugas merupakan hal yang sangat penting dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan. Kemampuan petugas dalam menyampaikan materi menjadi salah satu indikator dalam keberhasilan pencegahan terhadap kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Berdasarkan temuan peneliti, terdapat beberapa personel yang belum memiliki kualifikasi khusus atau pernah melakukan pendidikan kejuruan fungsi Binmas. Berikut akan dilampirkan tentang data personel satuan Binmas yang pernah melakukan pendidikan kejuruan fungsi Binmas pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.12

NO	NAMA	PANGKAT	JABATAN	DIKBANG/ TAHUN	DIKJUR/ TAHUN
1	Agus Subiyanto, SH	AKP	Kasat	Sepa 2002	Pa Bahasa Jepang dan Ilegal Fishing
2	Sudriyo	IPTU	Kaur Binops	Pa SAG 2012	Sandi 1997
3	Endang Budiarti	AIPTU	Kanit		PJR 1995

			Bintibmas		
4	Suhartono	AIPTU	Kanit Binkamsa		
5	Kokok Kurnianto, SH	AIPTU	Kaurmintu		Stand by Force
6	Noor Hidayat	AIPTU	Kanit Binpolmas		Das Binmas
7	Sri Rejeki	AIPTU	Banit		Das Ba Lantas
8	Suwardi	AIPTU	Banit		
9	Kuswandi	AIPDA	Banit	Caba	Serse
10	Second Is U, S.Pd.I, M.M	BRIPKA	Banit		Lat Ops VCD dan Penyuluhan Masyarakat
11	Esa Nanda Putra	BRIPTU	Bamin		Jur Dalmas Porong 2016

Data Personel Satuan Binmas yang Pernah Dikbang dan Dikjur

Sumber : Satuan Binmas Polres Cilacap dan dianalisis oleh peneliti

Berdasarkan tabel 4.12, dapat dilihat bahwa personel yang pernah melaksanakan pendidikan kejuruan Binmas hanya satu orang. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya kemampuan yang dimiliki oleh personel satuan Binmas.

4.3.2 Faktor Eksternal

Dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap juga terdapat faktor eksternal. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari pihak luar. Adapun faktor eksternal tersebut berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) sebagai berikut :

a. Peluang (*Opportunities*)

Faktor pendukung yang berasal dari pihak luar adalah berupa adanya kerja sama dengan Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama. Dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap dibantu oleh Tokoh Masyarakat (Tomas) dan Tokoh Agama (Toga), membuka jalan bagi Satuan Binmas terhadap masyarakat untuk mau menerima keberadaan dan mendengarkan materi penyuluhan yang diberikan. Sehingga tujuan dari pelaksanaan bimbingan penyuluhan tercapai dan komunikasi dua arah terjalin.

b. Ancaman (*Threats*)

Dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap juga memiliki ancaman. Yang menjadi ancaman tersebut antara lain :

1. Kurang adanya partisipasi dari masyarakat.

Hal itu dikarenakan mayoritas masyarakat Cilacap pergi bekerja dari pagi hari dan pulang kerja pada sore hari. Sehingga peserta bimbingan penyuluhan yang hadir hanya sebagian masyarakat. Padahal seharusnya pelaksanaan bimbingan penyuluhan dilakukan kepada seluruh lapisan masyarakat.

2. Luas wilayah

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui bahwa jumlah personel satuan Binmas hanya berjumlah 12 orang. Sedangkan luas wilayah kabupaten Cilacap adalah 2.253,61 km² yang terdiri dari 24 kecamatan terbagi dalam 15 kelurahan, 269 desa, 2.316 Rw, dan 10.447 Rt. Dengan jumlah personel yang hanya berjumlah 12 orang tersebut tentu

akan menjadi ancaman dan kendala dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap.

3. Karakteristik Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa karakteristik masyarakat juga menjadi faktor yang mempengaruhi dan sangat berpengaruh terhadap tercapainya tujuan dari pelaksanaan bimbingan penyuluhan. Menurut Soekanto (2004:153), bahwa dalam masyarakat yang modern sering dibedakan antara masyarakat pedesaan (*rural community*) dengan masyarakat perkotaan (*urban community*).

a. Masyarakat Pedesaan (*rural community*)

merupakan masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan dikategorikan sebagai masyarakat yang hidup di dalam suasana, cara dan pemikiran pedesaan. Masyarakat pedesaan mempunyai ciri dan kepribadian sendiri. Mereka hidup secara berdampingan dengan penuh kebahagiaan, tolong-menolong dan gotong royong yang disertai dengan suasana alam yang masih sederhana. Pekerjaan mereka masih tergantung dari pertanian yang digarap secara tradisional.

b. Masyarakat Perkotaan (*urban community*)

Dilihat dari segi fisik, kota merupakan suatu pemukiman yang mempunyai bangunan-bangunan perumahan yang jaraknya relatif rapat dan mempunyai sarana dan prasarana serta fasilitas-fasilitas yang memadai guna memenuhi kehidupannya.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa masyarakat Cilacap merupakan tipe masyarakat perkotaan. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut :

Tabel 4.13

NO	KECAMATAN	BURU H	INDUS TRI	NELAY AN	JASA	BANGUN AN	PEDAGA NG
1	2	3	4	5	6	7	4
1.	Dayeuhluhur	17.111	7.265	-	1.446	1.178	2.281
2.	Wanareja	30.782	13.646	-	2.618	3.093	4.835
3.	Majenang	32.854	17.747	-	9.892	2.808	7.688
4.	Cimanggu	38.777	19.551	-	7.012	2.787	5.538
5.	Karangpucung	15.538	11.563	-	3.666	2.473	3.768
6.	Cipari	20.936	9.889	-	2.964	2.076	2.344
7.	Sidareja	12.762	7.280	-	3.587	1.505	3.710
8.	Kedungreja	42.703	11.621	88	1.085	2.280	3.609
9.	Patimuan	9.874	7.657	332	1.080	2.814	1.896
10.	Gandrungmangu	36.621	18.598	15	2.052	2.106	3.946
11.	Bantarsari	30.228	13.602	56	1.044	2.404	2.595
12.	Kawunganten	54.092	17.242	157	1.354	2.927	2.906
13.	Kampunglaut	2.744	1.616	1.439	227	211	564
14.	Jeruklegi	15.246	9.782	35	2.902	2.423	2.866
15.	Kesugihan	49.489	24.412	711	6.763	5.945	8.684
16.	Adipala	21.932	13.822	573	4.091	5.373	2.011
17.	Maos	20.440	6.494	142	1.069	1.858	1.796
18.	Sampang	19.384	10.147	29	1.028	604	1.365

19.	Kroya	20.832	11.987	57	8.486	2.869	9.011
20.	Binangun	19.747	12.197	99	1.187	4.242	6.771
21.	Nusawungu	13.695	7.860	956	1.743	12.465	2.248
22.	Cilacap Selatan	6.346	257	5.115	9.475	2.864	8.584
23.	Cilacap Tengah	4.544	2.029	1.587	8.584	3.394	6.837
24.	Cilacap Utara	3.764	3.019	1.537	6.710	3.364	5.140
							4.324
							5.643
	Jumlah	540.441	259.283	12.928	95.016	74.063	100.993

Data Penduduk Cilacap Menurut Mata Pencapaian

Sumber : Intel Dasar satuan Intel Polres Cilacap, 2016

Berdasarkan tabel 4.13 menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Cilacap mayoritas bekerja sebagai buruh baik itu buruh tani maupun buruh pabrik, selain itu juga sebagai pekerja industri dan pedagang yang mana merupakan tipe masyarakat perkotaan. Menurut Soekanto (2004:156-157), bahwa masyarakat perkotaan memiliki karakteristik sebagai berikut :

- 1) Kehidupan keagamaan yang kurang bila dibandingkan dengan kehidupan beragama di desa.
- 2) Orang kota pada umumnya dapat mengurus dirinya sendiri tanpa harus bergantung pada orang lain.
- 3) Pembagian kerja diantara warga kota jauh lebih tegas dan punya batas kota.
- 4) Peluang untuk mendapatkan pekerjaan tidak luas.
- 5) Jalan pikiran rasional pada umumnya dianut oleh masyarakat perkotaan, menyebabkan interaksi-interaksi yang terjadi lebih didasarkan pada faktor kepentingan daripada faktor pribadi.
- 6) Efisiensi dan efektivitas waktu yang sangat diperhatikan.
- 7) Perubahan-perubahan sosial tampak dengan nyata Sistem kehidupan masyarakat kota mempunyai corak-corak kehidupan tertentu yang jauh berbeda apabila dibandingkan dengan masyarakat di desa.

Selain itu, menurut Mansyur (2004:107), bahwa terdapat sifat - sifat yang tampak menonjol pada masyarakat perkotaan adalah sebagai berikut :

- 1) Sikap hidupnya cenderung pada individualism/egoism.
- 2) Tingkah lakunya bergerak maju mempunyai sifat kreatif, radikal dan dinamis.
- 3) Perwatakannya cenderung pada sifat materialistis.
- 4) Pandangan hidupnya menjurus pada materialistis. Masyarakat kota cenderung mementingkan pribadi, memungkinkan mereka mengabaikan faktor-faktor sosial dalam lingkungan masyarakatnya.
- 5) Nilai-nilai religi cenderung berkurang karena aktivitas dan pikiran terlalu disibukkan oleh hal-hal yang menjurus kepada usaha keduniawian.

4. Lingkungan

Lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pelaksanaan bimbingan penyuluhan. Lingkungan merupakan kondisi yang didalamnya terdapat manusia dan aktivitasnya. Lingkungan masyarakat mempengaruhi kesejahteraan manusia dan tingkah laku manusia yang tinggal didalamnya. Dalam kehidupan masyarakat modern, lingkungan merupakan tempat terjadinya komunikasi yang mana merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting terutama untuk menerima

dan menyampaikan informasi dari satu pihak ke pihak lain. Akibat pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam waktu yang sangat singkat, informasi - informasi tentang peristiwa - peristiwa, pesan, pendapat, berita, ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya dengan mudah diterima oleh masyarakat, sehingga media massa surat kabar, TV, film, radio, majalah, dan lainnya mempunyai peranan penting dalam proses transformasi nilai - nilai dan norma - norma baru kepada masyarakat.

4.4 Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan Satuan Binmas dalam Mencegah Tindak Pidanan Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Cilacap

Satuan Binmas Polres Cilacap sebagaimana tugas pokoknya telah melaksanakan kegiatan preemtif dalam pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dengan melakukan bimbingan penyuluhan. Namun faktanya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih terjadi setiap tahunnya. Berdasarkan data 4 (empat) tahun terakhir bahwa pencurian kendaraan bermotor yang terjadi mengalami peningkatan dan penurunan. Untuk lebih jelasnya penulis sajikan dalam bentuk tabel di bawah ini :

Tabel 4.14
Data *Crime Index* Polres Cilacap dalam 4 Tahun Terakhir

NO	URAIAN	2013		2014		2015		2016	
		L	S	L	S	L	S	L	S
1	Currat	115	60	152	88	61	63	56	39
2	Curanmor	34	6	14	4	64	38	27	39
3	Narkoba	38	38	46	46	31	31	35	35
4	Curras	6	3	6	6	12	9	10	11

Sumber : Bagops Polres Cilacap

Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Cilacap masih terjadi dan dengan jumlah yang berbeda-beda setiap tahunnya. Oleh sebab itu, perlunya mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas agar terciptanya tujuan yang ingin dicapai. Dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan penyuluhan tersebut peneliti menggunakan Teori Manajemen (P.O.A.C) dalam menganalisisnya.

1. Perencanaan (*Planning*)

Dalam melaksanakan suatu kegiatan harus adanya perencanaan yang baik, agar tercapainya tujuan dengan optimal. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan perencanaan yang baik yaitu ditunjukkan dengan adanya rencana kegiatan yang dibuat oleh satuan Binmas. Berdasarkan temuan peneliti, bahwa pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap tidak dibuat dalam bentuk rencana kegiatan. Mengacu pada SOP pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang disusun oleh satuan Binmas Polres Cilacap, bahwa pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan satuan Binmas dilakukan berdasarkan pada empat hal, yaitu : 1) permintaan persurat dari masyarakat / instansi; 2) permintaan melalui telpon atau lisan; 3) petugas turun ke masyarakat / instansi; 4) bersifat insidental.

Seharusnya pelaksanaan bimbingan penyuluhan harus direncanakan secara matang yaitu dengan dibuatnya rencana kegiatan. Dengan adanya rencana kegiatan, seluruh kegiatan untuk pelaksanaan bimbingan penyuluhan akan terjadwal dan dapat lebih optimal. Untuk mengoptimalkan pencegahan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pelaksanaan bimbingan penyuluhan harus dilakukan secara berkala. Yang dimaksud secara berkala adalah dilakukan secara berulang, contohnya dua kali dalam seminggu.

Pelaksanaan bimbingan penyuluhan idealnya harus dilakukan berdasarkan perencanaan yang baik sehingga dapat mencapai tujuan yang maksimal. Perencanaan yang baik adalah sebagaimana terdapat pada Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 8 sebagai berikut :

1. Menyiapkan materi
Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan harus terlebih dahulu menyiapkan materi yang akan disampaikan, selain itu juga menyiapkan konsep terkait pelaksanaan bimbingan penyuluhan serta hal – hal yang harus disampaikan pada saat pelaksanaan bimbingan penyuluhan, seperti : (1) tentang modus operandi yang digunakan pelaku kejahatan pencurian kendaraan bermotor serta cara pencegahannya, (2) tentang tempat – tempat rawan yang biasanya terjadi pencurian kendaraan bermotor, (3) tentang jam – jam rawan yang biasanya terjadi pencurian kendaraan bermotor.
2. Mengkoordinasikan dengan pejabat terkait
Sebelum pelaksanaan bimbingan penyuluhan dilakukan satuan Binmas terlebih dahulu harus melakukan koordinasi dengan pejabat terkait. Koordinasi tersebut dilakukan melalui telepon atau datang secara langsung dengan panitia/pihak sasaran untuk meminta atau mengkonfirmasi terkait waktu, tempat, materi, jumlah peserta dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan tersebut.
3. Menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan
Dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan terlebih dahulu harus menyiapkan petugas yang akan melakukan kegiatan bimbingan penyuluhan. Petugas tersebut harus ditunjuk secara khusus. Petugas yang ditunjuk haruslah yang menguasai materi.
4. Menyusun tim penyelenggara kegiatan
Sebelum dilaksanakannya kegiatan bimbingan penyuluhan haruslah disusun tim penyelenggara kegiatan. Tujuan disusunnya tim penyelenggara kegiatan adalah untuk memperjelas personel yang ditunjuk dan bertugas dalam kegiatan penyuluhan tersebut.
5. Menyiapkan alat-alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau alat penolong instruksi (alongins)
Alat peraga, alins dan/atau alongins harus disiapkan sebelum pelaksanaan kegiatan penyuluhan dilakukan. Tujuan digunakannya alat peraga, alins dan/atau alongins adalah untuk mempermudah petugas dalam melakukan penyuluhan. Selain itu, juga untuk membantu serta mempermudah peserta dalam memahami atau mengerti tentang materi yang disampaikan.

Berdasarkan kelima unsur yang telah dijelaskan diatas, bahwa perencanaan yang baik adalah dengan melakukan persiapan yang maksimal sebagaimana yang terdapat dalam Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 8. Sehingga dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dapat optimal dan tujuan dapat tercapai.

2. Pengorganisasian (*Organizing*)

Pengorganisasian merupakan proses yang menyangkut bagaimana strategi dan taktik yang telah dirumuskan dalam perencanaan didesain dalam sebuah struktur organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang kondusif, dan dapat memastikan bahwa semua pihak dalam organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan dengan baik.

Dengan adanya pengorganisasian yang baik tentu akan mempengaruhi keberhasilan tercapainya tujuan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan. Pengorganisasian yang baik idealnya adalah berdasarkan pada *Job description* masing-masing unsur sebagaimana yang telah diatur dalam SOP yang disusun oleh satuan Binmas Polres Cilacap.

3. Pelaksanaan (*Actuating*)

Pelaksanaan (*actuating*) adalah suatu tindakan yang mengusahakan agar semua perencanaan dan tujuan organisasi bisa terwujud dengan baik dan seperti yang diharapkan. Dengan kata lain pelaksanaan (*actuating*) tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan.

Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 21 Tahun 2007 Pasal 9 diatur tentang hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan (*actuating*) kegiatan bimbingan penyuluhan sebagai berikut :

- a. Memperkenalkan identitas diri;
- b. Menyampaikan materi/permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya;
- c. Penggunaan bahasa yang mudah dipahami;
- d. Metode yang digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi;
- e. Gunakan alat peraga, alins dan/atau alongins yang tersedia;
- f. Kuasai audiens dan ilmu komunikasi;
- g. Manfaatkan waktu seefisien mungkin; dan
- h. Alokasikan waktu untuk tanya jawab materi ceramah.

Selain itu, dalam Perkap No. 21 Tahun 2007 Pasal 10 juga diatur tentang hal-hal yang wajib diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan sebagai berikut :

- a. Tempat dan waktu yang disesuaikan dengan situasi dan keadaan lingkungan tempat bimbingan penyuluhan dilaksanakan;
- b. Petunjuk dan saran-saran dari pejabat setempat;
- c. Pelaporan setiap kegiatan kepada pejabat setempat secara lisan maupun tertulis; dan
- d. Keikutsertaan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat.

4. Pengawasan / Pengendalian (*Controlling*)

Pengendalian (*controlling*) bukan hanya sekedar mengendalikan pelaksanaan kegiatan, namun juga mengawasi dan bila perlu dapat melakukan koreksi. Dengan demikian apa yang dilakukan petugas dapat terarah dan tujuan kegiatan yang telah direncanakan dapat tercapai.

Controlling berdasarkan Perkap No. 21 Tahun 2007 terdapat pada pasal 11 yaitu tentang analisa dan evaluasi dilaksanakan dengan melalui beberapa tahapan, yaitu : a) pemantauan; b) pencatatan; c) penilaian; dan d) pelaporan berdasarkan hasil. Adapun pengawasan menurut George R. Terry, antara lain :

1. *Preventive Control*, yaitu pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilaksanakan.

2. *Repressive Control*, yaitu pengawasan yang dilakukan setelah kegiatan berlangsung, dengan mengawasi hasil dari pelaksanaan kegiatan, serta evaluasi dan laporan yang didapat.
3. Pengawasan saat proses dilakukan, yaitu pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan proses, sehingga langsung mengikuti proses dan mengadakan koreksi jika ada penyimpangan.
4. Pengawasan berkala, yaitu pengawasan yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kesepakatan.
5. Pengawasan mendadak (*Sidak*), yaitu pengawasan yang dilaksanakan mendadak untuk melihat kinerja personel sehari-hari dan menghindari terjadinya penyimpangan.
6. Pengawasan melekat (*Waskat*), yaitu pengawasan yang dilakukan secara dekat terhadap personel, hal ini sering dilakukan untuk tujuan-tujuan yang spesifik dan bersifat khusus, sehingga menghindari terjadinya penyimpangan atau kesalahan.

Berdasarkan temuan peneliti, bahwa pengawasan yang ada pada satuan Binmas Polres Cilacap adalah *repressive control*. Pengawasan dari pimpinan dalam hal ini adalah Kasat Binmas hanya berupa laporan hasil kegiatan baik berupa dokumentasi ataupun laporan pelaksanaan tugas. Seharusnya pimpinan melakukan pengawasan langsung pada saat pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian pengawasan yang dilakukan akan lebih efektif dan pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan dapat optimal.

4.4.1 Upaya - Upaya yang Telah Dilakukan oleh Satuan Binmas dalam Mengoptimalkan Pelaksanaan Bimbingan Penyuluhan

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa upaya yang telah dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap dalam mengoptimalkan pelaksanaan bimbingan penyuluhan yaitu dengan dilaksanakannya program Binmas Vaganza. Program Binmas Vaganza ini merupakan salah satu program terobosan satuan Binmas. Program Binmas Vaganza tersebut merupakan program yang baru dibuat oleh satuan Binmas dan pelaksanaannya baru berjalan mulai awal tahun 2017.

Sasaran dari Binmas Vaganza adalah pembinaan terhadap seluruh komponen masyarakat. Binmas Vaganza ini dalam pelaksanaannya memiliki sebutan yang bermacam-macam sesuai dengan sarasannya. Contohnya seperti Binmas Vaganza *One Day One School* yang sarasannya adalah pembinaan terhadap anak sekolah.

Menurut Kasat Binmas Polres Cilacap, AKP. Agus Subiyanto, SH (wawancara, 6 Maret 2017) bahwa “Program Binmas Vaganza ini tidak berbeda dengan kegiatan bimbingan penyuluhan pada umumnya, hanya namanya saja yang berbeda tapi untuk pelaksanaannya sama”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui bahwa program Binmas Vaganza yang ada di Polres Cilacap tidak berbeda dengan kegiatan bimbingan penyuluhan pada umumnya. Hanya saja nama atau sebutannya yang berbeda, untuk pelaksanaannya tetap sama dengan kegiatan bimbingan penyuluhan yang dilakukan satuan Binmas mulai dari tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan sampai dengan tahap pengawasan.

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan terhadap optimalisasi bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap, didapatkan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bimbingan penyuluhan merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap. Kegiatan ini merupakan kegiatan preemtif yang bertujuan mengajak masyarakat untuk ikut serta menjaga keamanan dan ketertiban. Dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan satuan Binmas Polres Cilacap mempunyai SOP penyuluhan yang dijadikan sebagai pedoman dalam melaksanakan bimbingan penyuluhan. Apabila dibandingkan dengan Perkap No. 21 Tahun 2007 Pasal 8, 9,10, dan 11, terdapat beberapa kegiatan atau tindakan yang belum dilaksanakan sesuai dengan pasal - pasal tersebut. Adapun kegiatan atau tindakan yang belum dilaksanakan tersebut sebagai berikut :
 - a. Pada tahap perencanaan, petugas tidak menyiapkan materi, tidak menyiapkan petugas bimbingan penyuluhan yang menguasai permasalahan, tidak menyusun tim penyelenggara, dan tidak menyiapkan alat - alat peraga, alat instruksi (alins), dan/atau penolong instruksi (alongins).
 - b. Pada tahap pelaksanaan, petugas tidak menyampaikan materi / permasalahan secara keseluruhan, cara-cara pemecahannya, dan langkah-langkah antisipasinya serta petugas tidak menggunakan alat peraga alins dan/atau alongins yang tersedia karena rusak.
 - c. Pada tahap pengawasan dan/atau pengendalian, pimpinan tidak melakukan pemantauan dan pencatatan.

Dari ketiga hal diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap belum optimal.
2. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap. Faktor - faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu :
 - a. Faktor Internal, meliputi kekuatan dan kelemahan. Kekuatan berupa adanya dukungan dari fungsi lain. Sedangkan untuk kelemahan berupa sarana prasarana dan kemampuan kemampuan petugas.
 - b. Faktor eksternal, meliputi peluang dan ancaman. Peluang berupa adanya kerja sama yang baik dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama. Sedangkan ancaman berupa kurangnya partisipasi dari masyarakat Cilacap, luas wilayah, karakteristik masyarakat, dan lingkungan.

Dari beberapa faktor di atas, diketahui bahwa faktor yang menjadi penghambat lebih banyak dari pada faktor pendukung dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas Polres Cilacap. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap belum optimal dikarenakan adanya faktor-faktor penghambat, baik dari internal maupun eksternal.
3. Guna mengoptimalkan bimbingan penyuluhan yang dilakukan satuan Binmas Polres Cilacap, dilaksanakannya program Binmas Vaganza. Program Binmas Vaganza tersebut merupakan program yang baru dibuat oleh satuan Binmas dan pelaksanaanya baru berjalan mulai awal tahun 2017. Mengingat Program Binmas

Vaganza tersebut baru berjalan mulai awal tahun 2017, maka hasil dari pada program Binmas Vaganza tersebut belum dapat diketahui.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian terhadap bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Cilacap belum optimal. Oleh karena itu, peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan bimbingan penyuluhan, satuan Binmas Polres Cilacap memang harus berpedoman pada SOP. Namun, apabila dibandingkan dengan Perkap No. 21 Tahun 2007 tentang bimbingan penyuluhan keamanan dan ketertiban terdapat beberapa kegiatan yang belum dilaksanakan. Peneliti mengajukan saran kepada Kasat Binmas Polres Cilacap agar SOP penyuluhan yang telah disusun untuk dievaluasi berdasarkan Perkap No. 21 Tahun 2007. Sehingga pelaksanaan kegiatan bimbingan penyuluhan dapat berjalan dengan optimal.
2. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan oleh satuan Binmas tidak menggunakan alat peraga, alins, dan alongins dikarenakan rusak. Untuk itu peneliti menyarankan kepada Kasat Binmas agar dapat melakukan perbaikan serta penambahan terhadap sarana prasarana yang mendukung dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan sehingga tujuan pelaksanaan bimbingan penyuluhan dapat berjalan dengan optimal.
3. Berdasarkan tabel 4.10, menunjukkan bahwa banyak personel satuan Binmas Polres Cilacap yang belum pernah melaksanakan pendidikan pengembangan ataupun pendidikan kejuruan Binmas. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, peneliti menyarankan kepada Kasat Binmas agar personel yang belum pernah melaksanakan pendidikan pengembangan ataupun pendidikan kejuruan untuk diberikan kesempatan. Sehingga mempunyai kemampuan yang mumpuni dan pelaksanaan bimbingan penyuluhan dapat lebih optimal.
4. Satuan Binmas Polres Cilacap perlu melakukan inovasi - inovasi terhadap metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan. Berdasarkan temuan peneliti, bahwa petugas sering menggunakan metode ceramah dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan. Sehingga menimbulkan kejenuhan atau kebosanan terhadap para peserta binluh. Untuk itu peneliti menyarankan kepada Kasat Binmas agar metode yang digunakan dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan lebih inovasi seperti menggunakan film.
5. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa luas wilayah dan jumlah personel yang terbatas menjadi ancaman dalam pelaksanaan bimbingan penyuluhan yang dilakukan oleh satuan Binmas Polres Cilacap. Sehingga peneliti menyarankan kepada Kasat Binmas Polres Cilacap agar melakukan koordinasi dengan unit Binmas yang ada di Polsek – Polsek terutama Polsek yang berada di perbatasan wilayah Cilacap terkait pelaksanaan bimbingan penyuluhan tentang pencurian kendaraan bermotor.
6. Berdasarkan hasil penelitian, bahwa kepercayaan masyarakat sangatlah penting terhadap tercapainya tujuan dari pada pelaksanaan bimbingan penyuluhan. Sehingga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tersebut peneliti menyarankan kepada Kasat Binmas untuk membuat kotak saran ditempat pelaksanaan bimbingan penyuluhan disertai dengan nomor telepon yang dapat dihubungi.

REFERENSI

Buku :

- Akademi Kepolisian. 2015. *Manajemen Pembinaan Polri*. Semarang: Akpol.
- Akademi Kepolisian. 2016. *Metodologi Penelitian*. Semarang: Akpol.
- Himpunan Teori/Pendapat para Sarjana yang Berkaitan dengan Kepolisian 2008.
- Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian. 2016. *Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pembimbingan Skripsi Program Sarjana Strata Satu (S-1) Terapan Kepolisian Taruna Akademi Kepolisian*. Semarang: Lembaga Pendidikan Polri Akademi Kepolisian.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suparlan, Parsudi. 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Program Kajian Wilayah Amerika program Pasca Sarjana universitas Indonesia.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara

Skripsi :

- Kurniawan, Johan, PTIK 62 Skripsi tentang *Upaya Satuan Binmas Polresta Bandar Lampung dalam Mencegah Curanmor di Kelurahan Kampung Baru*:Semarang:STIK-PTIK.
- Syntia, Vebri, PTIK 62 Skripsi tentang *Optimalisasi Program Polmas Jakwire Wong Tegal Mewujudkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Kondusif di Polres Tegal Kota*:Semarang:STIK-PTIK.

Peraturan Perundang-undangan :

- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Amandemen ke-IV)*.
- Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Bimbingan Penyuluhan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat*.

Internet :

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <http://kbbi.web.id/>
- Cilacap, Kabupaten. "Karakteristik wilayah Cilacap" dalam <http://cilapkab.go.id/v2/index.php?pilih=hal&cid=3>. 3 Januari 2017.
- Banyumas, Radar. "Cilacap Utara Rawan Curanmor" dalam <http://radarbanyumas.co.id/cilacap-utara-rawan-curanmor/>. 4 Januari 2017.
- Cilacap, Tribratanews. "13 Pelaku kejahatan Curanmor di bekuk" dalam <http://tribratanewscilacap.com/satreskrim/13-pelaku-kejahatan-kendaraan-bermotor-di-bekuk-sat-reskrim-polres-cilacap>. 4 Januari 2017.

